

PERTEMUAN II

EMANSIPASI DAN ORGANISASI AWAL

A. Emansipasi Wanita dan Nasionalisme

Mengenai keadaan wanita Indonesia pada masa kolonialisme Belanda masih ada dalam konservatisme dan sangat terikat oleh adat. Pendidikan di sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan hanya mendapat pendidikan di rumah atau di lingkungan keluarga dan pendidikan yang diperolehnya tidak lebih dari persiapan untuk menjadi seorang Ibu rumah tangga yang baik. Memasak, menjahit dan membatik merupakan sebagian besar kegiatan anak-anak perempuan. Ikatan adat sangat kuat yang tidak memungkinkan mereka lepas dari kungkungan adat dan keluarga, dan kalau dibanding dengan anak laki-laki mereka jauh ketinggalan.

R.A. Kartini (1879-1904), pelopor gerakan emansipasi, menyerukan agar bangsa Indonesia diberi pendidikan, khususnya kepada wanita Indonesia mereka yang memikul tugas suci. Kalau wanita mendapat pendidikan maka kemajuan wanita hanya soal waktu saja. Sebenarnya buah pikiran Kartini untuk memajukan wanita Indonesia sudah ada di dalam kumpulan surat-surat “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang ditulisnya tahun 1899-1904, yang berisi tentang kehidupan keluarga, adat istiadat, keterbelakangan wanita, cita-cita terhadap kebahagiaan bangsanya, dll.

Dalam waktu yang singkat, cita-cita Kartini mulai terealisasikan, sekolah-sekolah putri mulai didirikan dan emansipasi wanita selalu dibicarakan. Pada tahun 1912 didirikan sekolah Kartini di Semarang atas dorongan Van Deventer. Selain di Semarang didirikan pula di Malang, Jakarta, Madiun, Bogor dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan di Cirebon, Rembang, Pekalongan, Indramayu, Surabaya dengan bahasa Jawa dan lain-lain.

Konservatisme dan ikatan adat dapat ditembus dan wanita Indonesia sudah dapat kebebasan yang dikejanya terus melalui organisasi wanita. Pada tahun 1915 Raden Dewi Sartika (1884-1947) mendirikan perkumpulan pengasah budi di Bandung dan di Semarang didirikan Budi Wanito yang memperjuangkan kemajuan dan emansipasi wanita.

1. Organisasi Wanita

Pergerakan wanita muncul sebagai realisasi dari cita-cita Kartini yang memperjuangkan perbaikan kedudukan sosial wanita. Perhatian awal pergerakan wanita yaitu dalam hal perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan, dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu.

Pada tahun 1912, berdirilah Putri Merdika di Jakarta atas usaha Budi Utomo yang bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan. Organisasi Kautaman Istri berdiri di beberapa tempat yaitu : Tasikmalaya (1913), Sumedang dan Cianjur (1916), Ciamis (1917), dan Cicurug (1918). Untuk memajukan kecakapan wanita dalam hal rumah tangga dikelola oleh perkumpulan Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Susilo di Pematang (1918), Wanito Hadi di Jepara (1915). Organisasi ini juga bertujuan mempererat persaudaraan antara kaum ibu. Setelah tahun 1920, organisasi wanita makin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial politik pada umumnya. Jumlah organisasi wanita bertambah banyak, setiap organisasi politik mempunyai bagian wanita, misalnya Wanudyo Utomo bagian dari SI, kemudian Sarekat Perempuan Islam Indonesia.

Jenis organisasi wanita pun ada yang merupakan organisasi pemuda terpelajar seperti Putri Indonesia, JIB Dames Afdeling, Jong Java bagian Gadis-Gadis, organisasi Wanita Taman Siswa, dll. Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia juga diterima di kalangan organisasi-organisasi wanita tersebut. Untuk membulatkan tekad dan mendukung persatuan Indonesia diadakan kongres perempuan Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928 yang bertujuan mempersatukan cita-cita dan memajukan wanita Indonesia serta membuat gabungan organisasi wanita. Dalam kongres tersebut diputuskan untuk membentuk gabungan organisasi wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).

Kemudian PPI pada tanggal 28-31 Desember 1929 mengadakan kongres di Jakarta. Kongres ini masih membahas kedudukan wanita dan antipoligami. Nama gabungan organisasi itu diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) merupakan federasi yang bertujuan memperbaiki nasib dan derajat wanita Indonesia. Organisasi ini tidak mencampuri urusan politik dan agama.

Pada tahun 1930 berdirilah organisasi wanita berdasar kebangsaan di Bandung atas anjuran PNI, yang diberi nama Istri Sedar (IS). Organisasi ini memusatkan tenaganya di bidang ekonomi dan kemajuan wanita. Organisasi ini bersikap netral terhadap agama dan menjangkau semua lapisan wanita, baik golongan atas maupun bawah. Pada tanggal 4-7 Juni 1931 organisasi ini mengadakan kongres. Dalam propagandanya organisasi ini sering menyuarakan antikolonial sebagai konsekuensi dari keyakinan nasional yang radikal. Sebagai organisasi, organisasi IS tidak secara langsung terjun dalam politik namun setelah kongres diadakan, pemerintah selalu mengamati aktivitas organisasi IS ini.

Organisasi Istri Sedar (IS) terus berselisih dengan PPII. IS mencemooh federasi PPII itu. Perjuangan wanita sudah sewajarnya masuk ke lapangan politik dan tidak hanya memajukan kesejahteraan seperti di negara merdeka. IS dalam langkah politiknya banyak mendapat dukungan dan bantuan dari kaum nasionalis kiri dan istri-istri anggota PNI lama. Kelemahan IS ialah karena PNI sebagai pendukung sudah tidak ada sehingga program IS kurang disetujui oleh wanita Islam.

Selanjutnya IS mengadakan kongres berikutnya pada tahun 1932 yang mengungkap kembali tentang penghargaan atas derajat wanita dan kebangsaan. Sementara itu PPII sebagai federasi organisasi wanita di satu sisi tidak dapat bekerjasama dengan IS yang lebih banyak menyerang federasi PPII ini. Akan tetapi di sisi lain PPII bekerjasama dengan IS dalam rangka pengiriman delegasi ke kongres Wanita Asia di Lahore. Akhirnya pengiriman delegasi itu dilakukan oleh PPII.

Terdorong untuk menyatukan organisasi guna mendapatkan kekuatan nyata maka dibentuklah organisasi yang tidak mendasarkan diri pada agama yaitu Istri Indonesia (II). Organisasi ini bertujuan sama dengan Indonesia Muda dan PBI yaitu demokrasi yang menuju Indonesia Raya. II cenderung bergerak dekat dengan pemerintah alias kooperatif. Dalam kongresnya yang diadakan pada tahun 1940 Istri Indonesia diikuti oleh organisasi politik lainnya yang menuntut Indonesia Berparlemen.

B. Budi Utomo 1908

Pada tahun 1907 Dr. Wahidin seorang tokoh cendekiawan yang merasa bertanggung jawab atas kebodohan dan keterbelakangan bangsanya melakukan kunjungan ke sekolah STOVIA (salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan

priyayi rendah Jawa). Siswa di sana sangat bersemangat dan memberikan tanggapan yang baik atas kedatangan Dr. Wahidin. Bersama beberapa siswa STOVIA seperti Soetomo dan Goenawan Mangunkusumo, Dr. Wahidin mengadakan perjalanan keliling Pulau Jawa untuk menghimpun dana pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh Dr. Wahidin itu mendapat simpati yang besar dari semua kalangan. Mereka yang kebetulan memiliki uang dengan sukarela memberikan sumbangannya. Setelah diadakan rapat-rapat untuk membicarakan lebih jauh rencana mereka, pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di jalan Abdulrahman Saleh 26 Jakarta terbentuklah suatu perkumpulan yang dinamakan Budi Utomo, yang diketuai oleh Soetomo.

Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern, dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota. Lahirnya Budi Utomo, telah merangsang berdirinya organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan sosio-politik Indonesia. Budi Utomo bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial, karena BU menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu sehingga wajar jika BU berorientasi kultural. Dalam perjalanannya, BU dengan fleksibilitasnya itu mulai menggeser orientasinya dari kultur ke politik. Edukasi barat dianggap penting dan dipakai sebagai jalan untuk menempuh jenjang sosial yang lebih tinggi.

Budi Otomo bukan hanya dikenal sebagai salah satu organisasi nasional yang pertama di Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu organisasi terpanjang usianya sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. BU memang mempunyai arti yang penting meskipun anggotanya sangat sedikit dibanding dengan Sarikat Islam. Akan tetapi kehadiran Budi Utomo-lah yang menyebabkan berlangsungnya perubahan-perubahan politik hingga terjadinya integrasi nasional. Dr. Wahidin Soedirohusodo (1857-1917), lulusan STOVIA, sekolah dasar dokter Jawa, antara tahun 1906-1907 berkeliling pulau Jawa untuk berkampanye meningkatkan martabat rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar. Usaha ini ternyata tidak begitu berhasil. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin Soedirohusodobertemu dengan pemuda Soetomo, siswa STOVIA di Batavia. Perbincangan tentang nasib rakyat ternyata mengugah

Soetomo untuk mendiskusikan hal ini dengan teman - temanya, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah *Boedi Oetomo* dengan Soetomo sebagai ketuanya.

Organisasi yang bertujuan “ Kemajuan Bagi Hindia-Belanda “ ini terbuka bagi siapa saja, penduduk Jawa, Madura dan akhirnya meluas untuk seluruh penduduk Hindia, tanpa membedakan keturunan, agama, maupun jenis kelamin. Pada bulan Juli 1908, Boedi Oetomo telah memiliki 650 anggota yang tersebar di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya dan Probolinggo. Mereka yang bukan mahasiswa juga menggabungkan diri. Boedi Oetomo secara resmi menetapkan bahwa yang menjadi perhatiannya adalah penduduk Jawa dan Madura. Bahasa yang dipergunakan secara resmi dalam organisasi adalah bahasa Melayu. Orang-orang Sunda pun ikut dalam organisasi ini. Akan tetapi, lama-kelamaan peranan mahasiswa mulai tersingkirkan oleh kaum priyayi yang semakin menguasai organisasi. Sementara itu, rasa keunggulan budaya Jawa sering muncul ke permukaan sehingga dalam Boedi Oetomo cabang Bandung, organisasi terbagi dua menjadi bagian Jawa dan bagian Sunda. Setelah Boedi Oetomo, bermunculan organisasi lainnya. Pada bulan September 1908 orang-orang Ambon mendirikan asosiasi yang disebut *Ambonsch Studiefonds* pada tahun 1909 dan lain-lain.

C. Sarekat Islam

Organisasi Serikat Islam didirikan pada akhir tahun 1911 atau awal tahun 1912 di Surakarta. Secara umum diterima bahwa gerakan ini dibentuk H. Samanhudi, seorang pengusaha batik terkenal di kampung Lawean. Yang merupakan salah satu pusat terpenting kerajinan batik di Indonesia yang dalam abad ke-19 berhasil menyaingi kerajinan tekstil Eropa, dengan keberhasilannya ditemukannya metode cap. Kerajinan batik Surakarta berada dalam tangan pengusaha-pengusaha Jawa, Arab dan Cina. Jumlah pengusaha Jawa yang mayoritas, dengan tenaga kerjanya dari orang – orang Jawa juga. Dalam sejarah dinyatakan bahwa pembentukan SI ini adalah reaksi terhadap kegiatan orang Cina dalam perdagangan batik. Sebagai akibat digantikannya tekstil pribumi dengan bahan-bahan Cina yang diimpor, sehingga hal ini mengakibatkan seluruh industri batik jatuh ke dalam tangan orang Cina. Untuk mempertahankan diri, mereka para pedagang Jawa ini akhirnya bersatu pada tahun 1911 dan mendirikan SI.

Tetapi hal tersebut harus kita pertimbangkan lagi terutama mengenai latar belakang pendirian SI yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan orang Cina. Ada beberapa fakta yang menyangkalnya seperti bahwa konstansi orang Cina ini telah mengeluarkan para penguasa Jawa dari kerajinan batik ini. Dalam beberapa kasus memang terjadi tapi itu hanya terjadi di pusat batik kecil saja. Dan hal ini tidak benar karena di Surakarta sendiri, jumlah produsen batik orang Cina pada akhir tahun 1920-an masih saja lebih kecil dari pengusaha Jawa. Kedua, orang Cina telah menguasai perdagangan bahan baku batik sejak tahun 1890. jadi, peralihan dari bahan-bahan cat alamiah ke kimiawi pada awal abad ke-20 ini hampir tidak membawa perubahan, sebabnya perdagangan perantara sudah mereka kuasai.

Ketiga, ini fakta yang terpenting yang tidak sesuai dengan keterangan bahwa faktor ekonomilah yang melatar belakangi pendirian SI. Menurut penelitian, antara pedagang Cina dengan pedagang Jawa terutama jarang sekali timbul perselisihan. Hal ini dikarenakan mereka sudah saling kenal dan percaya satu sama lain sehingga mereka melakukan perdagangan ini bisa dengan secara lisan dan tertulis. Dan akhirnya bisa dikemukakan tujuan asal mula pendiriannya ini tidak semata – mata ataupun terutama faktor ekonomis saja. Jadi sulit untuk mempertahankan pendapat bahwa pembentukan SI ini merupakan reaksi dari penguasaan orang Cina dalam sektor batik. Namun ada keterangan lain yang menyebutkan, adanya bentrokan antara polisi dengan warga Cina di Surabaya dan Jakarta yang menimbulkan korban jiwa. Yang berakibat dengan pemogokan masal perdagangan orang Cina, hal ini melumpuhkan seluruh kegiatan ekonomi. Rinkes menyebutkan peristiwa ini terjadi karena adanya persaingan antar pengusaha Jawa dengan Cina terutama **Firma Sie Dhian Ho**. Selain itu tindakan sombong orang Cina terhadap bangsawan Indonesia pada masa itu di sinyalir sebagai salah satu penyebabnya juga. Tampaknya ini merupakan akibat dari adanya emansipasi yang juga timbul di kalangan warga Cina, apalagi setelah terjadinya revolusi Tiongkok.

Dalam perkembangannya, bentrokan terjadi tahun 1912 antara anggota SI dengan perwakilan orang Cina. Berkali-kali mereka (SI) menyerang pemuda-pemuda Cina. Tetapi para tokoh SI menganggap hal ini sudah keterlaluhan sehingga diambil tindakan untuk mencegah bentrokan dengan cara menjaga kegiatan pesta-pesta orang Cina oleh pengurus SI. Tetapi dalam bulan juli terjadi lagi kekacauan yang berhubungan

dengan penganiayaan terhadap orang yang melakukan perzinahan. Hal ini dijadikan alasan bagi residen Surakarta untuk melarang kegiatan SI untuk sementara waktu dan menyita dokumennya. Pelarangan ini malah menimbulkan lagi bentrokan dengan orang-orang Cina karena SI menaruh curiga bahwa yang menyebabkannya itu adalah orang Cina.

Kembali lagi ke permasalahan tentang terbentuknya SI yang banyak menimbulkan berbagai latarbelakang pendiriannya. Salah satunya lagi bahwa sudah sejak lama terdapat perkumpulan rahasia Jawa – Cina yang termasuk didalamnya itu H. Samanhudi. tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Orang – orang Cina berubah akibat adanya emansipasi di kalangannya. Yang mengakibatkan orang – orang Jawa keluar dan mendirikan perkumpulan sendiri bernama **Rekso Rumekso** yang akhirnya berubah menjadi SI.

Perjalanan dan perkembangan SI yang awal didirikannya ini sering bertrok dengan orang Cina berkembang dan telah pula menyebar keluar Surakarta bersamaan dengan gerakan emansipasi, sehingga semakin banyak cabang dan anggota SI. Pada 26 Januari 1913, diadakan kongres Si di Surabaya. Dalam pertemuan ini H Samanhudi di sambut besar-besaran oleh para anggota SI. Pada 23 maret diadakan lagi kongres umum yang kedua di Surakarta. Yang memilih H Samanhudi sebagai ketua dan Tjokroaminoto sebagai wakil ketuanya. Dalam kongres ini diperkirakan puluhan ribu yang mengikutinya, yang datang dari berbagai daerah. Sesudah kongres di Surabaya dan Surakarta perkembangan SI semakin pesat. Propaganda secara massal dilakukan oleh perkumpulan baru ini.

Perkembangan SI yang pesat ini menimbulkan sikap pamong praja yang berbeda-beda. Mulai mereka yang mempertimbangkannya secara obyektif sampai kepada yang keras menolak. Sementara dikalangan pegawai Indonesia sendiri juga terjadi perbedaan sikap dalam terhadap SI ada yang menerima dengan baik dan menolak sampai kepada yang sangat bermusuhan. Para Bupati yang menolak SI ini pada umumnya cemas dengan adanya kekhawatiran kehilangan wibawa dan posisi mereka terancam. Sementara Gubernur Jendral sendiri yang sebagian besara di rangkap oleh Rinkes ini bersikap hati – hati dalam mempertimbangkan usul dan pendapatnya mengenai keberadaan SI ini. Dia bersikap pragmatis dimana dia sepertinya setuju dengan tujuan – tujuan yang di usung

oleh SI ini tapi di sisi lain dia mengecam gerakan ini. Rinkes menulis sepucuk surat kepada Tjokroaminoto yang mengungkapkan bahwa banyak unsur – unsur “busuk” yang disusupkan ke dalam gerakan ini seperti banyaknya orang yang memanfaatkan-nya untuk keuntungan sendiri, secara keseluruhan dia menganggap bahwa gerakan ini tidak menggembirakan.

Tahun 1912 diajukan permohonan oleh Tjokroaminoto agar SI diakui sebagai badan hukum kepada Gubernur Jenderal yang pada waktu itu dipegang oleh Idenburg, tetapi dia belum mengambil keputusannya. Tujuannya yaitu agar SI ini mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum perdata dan dengan pengakuan badan hukum berarti pemerintah kolonial Belanda menyetujui secara resmi perkumpulan ini.

Kongres SI tahun 1913 dilangsungkan di Yogyakarta dari tanggal 18 -20 April, yang dihadiri oleh berbagai utusan dari 80 perkumpulan setempat. Yang bertujuan untuk menetapkan anggaran dasar dan memilih *Centraal Comite*. Pemilihan memberikan kemenangan definitif Tjokroaminoto terhadap H. Samanhoedi, yang dijadikan sebagai ketua kehormatan. Tahun 1916 timbul benih perpecahan ditubuh SI, yang disesalkan oleh pers Indonesia. Hal ini timbul dikalangan atas tokoh – tokoh SI seperti terutama antara Tjokroaminoto dengan Goenawan. Tetapi akibat perpecahan ini dalam jangka panjang tidak begitu berat seperti kelihatan pada awal mulanya. Karena Goenawan yang mendapat dukungan dari cabang SI di Jawa Barat ini bersedia memperbaiki perpecahan ini dengan CSI. Yang terjadi dalam kongres di Bandung pada tanggal 17 – 24 juni 1916. kongres ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. Mereka yang hadir dpada rapat – rapat umum dialun – alun sangat banyak.

Dalam pelbagai pikiran tentang emansipasi yang berlaku dikalangan SI dapat dibedakan unsur – unsur berikut :

- a. penolakan akan bermacam – macam prasangka negatif terhadap golongan pendudukan indonesia dan perlakuan yang tidak sama antara bangsa indonesia dengan bukan Indonesia
- b. penghargaan positif terhadap identitas sendiri
- c. cita – cita penentuan nasib sendiri dalam politik
- d. anti kapitalisme

Perlawanan akan prasangka negatif terhadap bangsa Indonesia yang terutama sering di jabarkan dalam reaksi – reaksi keras terhadap ucapan yang mengandung penghinaan dalam kalangan pers Eropa. Yang sering dilukiskan sebagai gerombolan orang dungu, pemalas, terbelakang, tidak mempunyai kemampuan berpikir atau sifatnya primitif. Yang sangat menghina dan menginjak harga diri bangsa Indonesia.

Soal lain yang peka dalam kalangan SI adalah masalah pergundikan (konkubinat) wanita Indonesia dengan lelaki Eropa atau Cina. Orang menganggap lembaga ini sebagai penghinaan terhadap wanita Indonesia dalam banyak kasus ini umumnya Nyai Eropa menjadi korbannya. Perbedaan penetapan gaji orang Eropa dengan Indonesia dengan ijazah yang sama juga semakin diprotes. Pada kongres SI tahun 1915 diterima sebuah mosi yang menyatakan keberatan pihak Indonesia terhadap perbedaan standar gaji tersebut. Perlawanan terhadap perbedaan perlakuan juga tidak hanya tertuju pada kedudukan orang Eropa saja tetapi kalangan priyayi atas juga dikecam oleh SI terutama terhadap kehidupan pribadi kalangan priyayi tinggi. Yang hidup mewah, gaji tinggi, minum-minuman dan main perempuan. Sehingga menimbulkan kebencian dari kalangan SI. Dalam segi moral juga SI menganggap orang Indonesia harus menjadi manusia yang baik agar perjuangan untuk emansipasi dapat berhasil. Sehingga mencita-citakan peningkatan moral rakyat Indonesia. Dalam kongres di Surakarta tahun 1913, Tjokroaminoto melancarkan kampanye gerakan moral.

Keanggotaan SI ini cukup ketat, bila seseorang hendak masuk anggota itu harus bersih kelakuannya. Kepada mereka yang reputasinya buruk dikenakan masa percobaan setengah tahun, selama itu mereka harus membuktikan telah memperbaiki kelakuannya. Dan ketika masuk anggota di sumpah janji untuk tidak melakukan tindakan – tindakan yang dilarangan partai. Ada laporan gejala- gejala puritan dari cabang – cabang di Cirebon, sibuk dengan pengawasan para anggotanya. Sementara di Surabaya, orang Madura ditolak masuk anggota karena mereka umunya suka mabuk – mabukan dan cepat mengeluarkan pisau. Sementara, contoh baik tentang penghargaan akan identitas diri dalam kalangan SI terdapat dalam diri wartawan Marco. Yang dalam suatu peristiwa menimbulkan kehebohan di gedung kesenian Surakarta dengan memakai pakaian Jawa bersama wanita Eropa. Sejak abad 16 di Jawa telah tumbuh tiga akar yang akan menjadi sendi-sendi kekuatan masyarakat pada kemudian hari. Kekuatan pertama adalah

kelompok kaum priyayi (aristokrat), kelompok ini berakar dari kebudayaan jawa-hindu. Kelompok kedua adalah kaum santri (ortodok), keberadaannya dilatarbelakangi oleh perkembangan Islam di Jawa. Kelompok ketiga adalah kaum abangan yaitu masyarakat pedesaan Jawa yang masih mendukung nilai-nilai kebudayaan pada masa pra-Hindu, meski tak dapat dipungkiri bahwa Islam dan Hindu tetap ada dalam karakteristik kelompok ketiga ini.

Buku ini membahas tentang pergolakan yang terjadi di Semarang, Khususnya perubahan-perubahan yang terjadi pada Sarekat Islam di Semarang sekitar tahun 1917-1920. Perubahan yang terjadi pada Sarekat Islam Semarang dilatarbelakangi oleh keadaan sosial masyarakat Indonesia yang buruk, khususnya keadaan penduduk Semarang. Pada tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda membuat beberapa peraturan baru, di mana dalam peraturan itu ada perubahan sistem jajahan. Yang pada awalnya seluruh kekayaan Indonesia dimonopoli oleh VOC, namun dengan adanya peraturan ini maka ada kebebasan “menjajah”. Modal-modal asing diperbolehkan masuk ke Indonesia, liberalisme menjalar di Indonesia. Namun model penjajahan seperti apapun tidak dapat memperbaiki keadaan sosial masyarakat Indonesia. Penjajahan tetap sebuah penjajahan. Struktur masyarakat Indonesia di Jawa, menjadi sebuah alat mempermudah model penjajahan ini. Para pembesar daerah, sebut saja Lurah, Bupati dan lainnya. Bukan malah membela rakyat mereka malah menjadi antek-antek penjajah. Tanah-tanah pertanian yang ada di desa-desa dipaksa beralih fungsi sebagai sebuah perkebunan, sedangkan para penduduknya secara massal dijadikan kuli. Hal itu biasanya dilakukan dengan memberikan sedikit premi pada para lurah.

Sebagai dampak dari perubahan lahan tersebut, maka turunlah produksi pangan (beras), banyak sekali rakyat Indonesia yang kelaparan, wabah penyakit pun memperparah keadaan, di Semarang wabah pes menjadi salah satu penyakit yang menelan banyak korban khususnya disekitar tahun 1917. Itulah beberapa hal yang memicu ketidakpercayaan masyarakat pada para aristokrat.

Secara kongkrit, hal itu terlihat dari berubahnya struktur organisasi Sarekat Islam Semarang pada 6 Mei 1917. Struktur organisasi yang awalnya dikuasai oleh para aristokrat, kini berubah. Para pengurus Sarekat Islam Semarang adalah orang-orang yang berasal dari kaum tani dan buruh. Komposisi kepengurusan tersebut adalah :

Presiden : Semaoen
Wakil Presiden : Noorsalam
Sekretaris : Kadarisman
Komisaris : Soeparedi, Aloei, Jahja, Aldjoefri, H.Boesro, Amathadi,
Mertodidjojo, Kasrin

Setelah perubahan kepengurusan pada Sarekat Islam. Tidak langsung ada perubahan pada sistem gerak kelompok tersebut. Semaoen harus mempengaruhi para pemebes Sarekat Islam lainnya. Sebagai usaha puncak merevolusionerkan gerakan SI Semarang, mulai 19 November 1917, merubah harian *Sinar Hindia* menjadi *Sinar Djawa*. Dan memasukan kaum muda militan sebagai pengelola harian tersebut. Dan memutuskan bahwa harian Sinar Jawa akan lebih radikal, karena rakyat Indonesia membutuhkan cambuk untuk melakukan pergerakan dan cambuk itu adalah artikel-artikel yang berani dan terang-terangan, agar pergerakan rakyat dapat bertambah militan dan tegas.

Sarekat Islam Semarang, berfikiran bahwa pemerintahan yang seharusnya memihak rakyat banyak malah memihak kaum kapitalis. Kekayaan dan juga rakyat Indonesia diperas habis oleh agen-agen kapitalis Barat ini. Sebagai dampak dari monopolisasi para kapitalis ini maka munculah kemiskinan di Indonesia yang melahirkan kriminalitas di kalangan rakyat Indonesia. Maka beberapa kalangan politik Indonesia, khususnya Sarekat Islam Semarang berpendapat untuk mengatasi semuanya diperlukan adanya sosialisme yaitu adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang penting bagi hidup orang banyak

Aksi-aksi Sarekat Islam Semarang, di antaranya adalah berupaya mengangkat permasalahan tanah partikelir, Volksraad, dan masalah nasib buruk kedalam kongres nasional sentral Sarekat Islam (CSI) ke-2 di Jakarta, yang diselenggarakan pada 20-27 Oktober 1917. Di sinilah Semaoen dan pengikut SI Semarang berupaya menyebarkan faham-faham Marxistis kepada pengikut Sarekat Islam yang lain. Hal ini mendapat pertentangan keras dari **Abdoel Moeis**. Namun pada kongres kali ini SI Semarang berhasil mempengaruhi setengah dari para peserta sidang. Pengaruh kelompok Semarang, nampak jelas dalam program kerja yang dihasilkan dalam kongres ini. Mereka juga mengusahaka nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar.

Desember 1917, SI Semarang mengadakan rapat anggota, kaum buruh diorganisasikan agar lebih militan dan mengadakan pemogokan-pemogokan terhadap

perusahaan-perusahaan yang bertindak sewenang-wenang. Korban pertama adalah sebuah perusahaan mebel yang memecat 15 orang buruhnya. Atas nama sarekat Islam, Semaoen dan Kadarisman memproklamasikan pemogokan. Mengajukan tiga tuntutan yaitu pengurangan jam kerja, selama mogok gaji dibayar penuh, setiap buruh yang dipecat diberi pesangon sebesar tiga bulan gaji. Dalam lima hari pemilik perusahaan menerima tuntutan Sarekat Islam Semarang. Pemogokan menjadi sebuah senjata ampuh bagi Sarekat Islam Semarang. Selain usaha di dalam, Sarekat Islam Semarang juga tetap aktif menentang pemerintahan kaum kapitalis seperti *Indie Weerbaar* dan *Volksraad*.

Pada April 1918 SI Semarang kembali dihadapi dengan masalah yang rumit, kali ini SI Semarang memotori pemogokan di sebuah harian. Tetapi pemogokan kali ini tidak berjalan baik. Ternyata majikan tidak peduli dengan aksi ini, alhasil tuntutan pun tak digubris. Sampai bulan Juni pemogokan masih berlangsung, SI Semarang sampai harus menurunkan dana bagi para buruh yang masih mogok, akhirnya satu persatu buruh kembali bekerja. Itu merupakan kegagalan SI Semarang secara moral. Kegagalan selanjutnya adalah ketika SI Semarang berkolaborasi dengan ISDV, dalam pemilihan *Gemeente Raad*. Sebagai calon adalah Semaoen, Mas Marco, Darsono, Soepardi, Kadarisman, Moh. Joesoef, Moh. Ali. Kekalahan dalam pemilihan dikarenakan persyaratan memilih didasarkan atas pembayaran pajak. Hanya mereka yang memiliki penghasilan f600 yang memiliki hak suara. Maka rakyat kecil yang menjadi tulang punggung SI Semarang tidak memiliki hak suara. Inilah yang menjadi faktor penyebab kekalahan SI Semarang dalam pemilihan.

Selain menghadapi masalah-masalah di atas SI Semarang juga harus mempersiapkan diri dalam Kongres Nasional Central Sarekat Islam ke-3 yang akan diselenggarakan di Surabaya pada 29 September-6 Oktober. Wakil dari SI Semarang adalah Semaoen, Darsono, Kasrin, Kadarisman, Soepardi dan Soegeng. Dalam Kongres Nasional CSI ini juga terjadi pertentangan kembali antara Abdul Muis dengan Semaoen. Namun kongres tetap bias berjalan baik karena kepemimpinan Tjokroaminoto. Dari sekian banyak keputusan yang diambil dalam kongres, hal yang sangat penting adalah tekad untuk menekan kapitalisme dengan mengorganisasikan buruh-buruh di kota-kota. Ini merupakan akar perjuangan kaum sosialis revolusioner.

Dari tahun ketahun kelaparan makin marak, Tjipto Mangoenkoesoemo yang merupakan anggota dari *Volksraad*. Menuntut pengurangan area tebu dan perbaikan nasib rakyat. Tetap tetap saja hasil dari keputusan *Volksraad* bahwa ide tersebut ditolak. Padahal sudah jelas bahwa rakyat sudah sangat menderita. Penolakan tersebut membenarkan pemikiran Semaoen bahwa tidak ada gunanya percaya pada pemerintah yang jelas-jelas mendukung agen kapitalis. Bulan September 1918 Sarekat Islam kembali melaksanakan sidang, kali ini hanya dihadiri oleh 10 orang. Dalam sidang ini diputuskan membentuk sebuah badan yang menyokong tokoh-tokoh pergerakan rakyat, termasuk mereka yang berada di luar Sarekat Islam. Selain itu sidang ini juga menghasilkan konsep-konsep dari buah pemikiran Semaoen, diantaranya penolakan atas Indie Weebaar, perdamaian dengan kaum Tionghoa, dan pengangkatan Sneevliet sebagai perwakilan SI di Nederland. Pada peretemuan ini SI Semarang yang diwakili oleh Semaoen telah mendominasi jalannya rapat.

Pergerakan memang mulai beraling ke arah kiri, ini merupakan kemenangan SI Semarang. Sekaligus menekankan bahwa perjuangan mereka akan semakin berat. Pemerintah semakin waspada terhadap SI Semarang, pemerintah mulai mengadakan penangkapan-penangkapan kepada para aktivis sosialis-revolusioner. Desember 1918, Sneevliet dikembalikan ke eropa, kemudian menyusul Darsono, Douwes dekker, Semaoen, Mas Marco. Mereka dituduh telah menyebarkan tulisan-tulisan yang menyatakan kebencian terhadap pemerintah.

Keadaan rakyat yang semakin buruk, penindasan yang semakin keras, dan aktivitas-aktivitas luar biasa SI Semarang, dengan sendirinya berjalan beriringan dan munculah letupan-letupan dari kesemuanya itu. Peristiwa Toli-Toli dan Cimamere. Dalam peristiwa Cimamere, Sostrokardono yang merupakan sekretaris Central Sarekat Islam dituduh terlibat. Maka Sarekat Islam dituduh terlibat dalam gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Belanda. SI Semarang memanfaatkan peristiwa tersebut untuk semakin mengerahkan massa, maka tekanan terhadap Sarekat Islam Semarang pun semakin keras pula. Melihat para anggota SI Semarang yang telah ditangkap akibat peristiwa ini (Semaoen, darsono, Partoatmodjo) maka dapat diperhitungkan bahwa mereka tidak akan bisa hadir dalam Kongres Nasional CSI yang ke 4.

Namun di luar perkiraan, ternyata mereka yang tidak hadir tetap memperoleh tempat dalam kepengurusan yang baru. Tak hanya itu, masuk juga Alimin, Soekarni yang merupakan tokoh ISDV masuk sebagai pimpinan dalam CSI. Ini membuktikan bahwa kerja keras Semaoen dalam CSI telah menuai hasil. Dan ini merupakan salah satu bukti SI telah bergeser, menjadi sebuah organisasi pergerakan nasional. Selain itu hubungan dengan Tionghoa pun membaik, padahal jelas SI pada awalnya adalah sebuah organisasi perdagangan yang melindungi para pedagang pribumi dari para pedagang asing (Tionghoa). Pada gerakan selanjutnya orang-orang Tionghoa ini akan menjadi donatur bagi pergerakan SI Semarang.

SI Semarang dibawah asuhan Semaoen merupakan salah satu cikal bakal gerakan sosialis di Indonesia. Sebagai perwujudan resmi dari gerakan sosialis di Indonesia dibentuklah PKI yang merupakan kelanjutan dari ISDV. Dalam pembentukan ini pun Semaoen, Darsono, Sneevliet turut ambil bagian. Maka merekalah yang merupakan agen sosialis-revolusioner yang memimpin pergerakan kaum sosialis di Indonesia.

Sekitar tahun 1914, atas prakarsa BO diselenggarakan pertemuan sejumlah perwakilan dari organisasi Indonesia. Yang membicarakan langkah apa yang harus dilakukan apabila terjadi agresi terhadap Indonesia. Terjadi perbedaan sikap mengenai hal tersebut. Tjokroaminoto sebagai perwakilan SI bersikap hati – hati terhadap usul - usul BO. Sementara dalam pers SI sendiri terdapat perbedaan, ada yang mendukung BO dengan memberikan bantuan kepada Belanda tapi ada juga yang menolak secara keras usul tersebut. Selain itu, masalah Dewan Rakyat yang akan dibentuk pada tahun 1917, beliau berkata bahwa dewan itu tidak bisa disebut ideal.

Sikap para pemimpin SI, yang selalu mengemukakan perlunya perjuangan dengan menempuh jalan revolusi dalam mencapai cita – cita. Tetapi Oetoesan Hindia menulis artikel bahwa perjuangan ini tidak harus dengan jalan revolusi yang sering menimbulkan kekerasan dan anarki tetapi ada cara lain yaitu dengan perjuangan damai secara diplomatis.

Dalam aspek keagamaan, SI ini sudah terlihat sejak awal dengan cita-cita pembaruan agama. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan, sampai sejauh mana SI ini sebagai gerakan keagamaan dan peranannya? menurut sebagian besar pengamat Eropa, agama dalam SI ini tidak merupakan faktor penting. Snouck Hurgronje, menganggap SI

bukan perkumpulan keagamaan, tetapi hanyalah lembaga yang berfungsi sebagai alat pengikat sosial politik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bukan Indonesia. Tetapi pendapat – pendapat tersebut tidak mempunyai dasar. Dalam kalangan SI terdengar banyak ucapan yang memperkuat kesan – kesan Snouck dan kawan.

Di Indonesia sendiri kebanyakan gerakan **milenerisme** ini bersifat *mesianistis*, yaitu percaya akan tercipta suatu negara yang tentram dan damai oleh seorang juru selamat. Di tradisi Jawa sendiri tokoh tersebut dikenal dengan *Ratu Adil*, yang pada suatu ketika akan membawa kemakmuran yang berlimpah ruah. Selanjutnya gerakan milenerisme di Indonesia ini mempunyai ciri dalam kepustakaan tentang gerakan primitif di sebut juga dengan istilah “ Nativisme“. Pengertian ini mencakup berbagai hal yang menunjukkan adanya kebencian yang kuat terhadap penguasa asing, yang dianggap bertanggung jawab akan keruntuhan masyarakat sekarang berlangsung. Milenarisme Indonesia juga telah mengalami pengaruh Islam yang kuat. Agama Islam mengenal ajaran eskatologi yang menyatakan bahwa masyarakat yang sempurna akan dibawa oleh mesias Islam yaitu Imam Mahdi. Harapan akan kedatangannya ini telah merasuk agak dini, kira – kira sejak abad ketujuh belas dan berbaur dengan ajaran dan harapan agama Hindu.

Banyak berita mengenai gejala milenarisme dalam gerakan Sarekat Islam juga mempunyai sifat “ di daerah ini terdapat macam – macam desas – desus “; disini beredar macam-macam kabar burung “; dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar keterangan tentang aspek milenarisme gerakan tersebut menjadi agak kabur dan mungkin sekali juga tidak selalu diandalkan. Yang akhirnya ini bukan saja disebabkan oleh tingginya sumber tetapi juga karena keadaan bahwa banyak berita mengenai segi – segi milenarisme gerakan ini berasal dari kalangan swasta Eropa atau Cina. Justru para informan ini rupanya ada kecenderungan untuk menambahi segi negatif gerakan ini, dan seperti itu pulalah terutama gerakan nativisme – milenarisme ini dianggap berlebihan.

Bagaimanakah reaksi sikap pemimpin SI terhadap gejala milenarisme dalam gerakan tersebut ? pada umumnya mereka menolak, ada laporan tentang penyambutan Tjokroaminoto oleh rakyat Situbondo merupakan bukti bahwa beliau tida menerima peranan mesiah yang diberikan orang kepadanya. Pada kesempatan yang sama para pemimpin SI yang lain memperingatkan jangan mempercayai omongan para propagandis

milenaristis. Ia mengingatkan kepada suatu pemberontakan milenaristis terkenal yang, “ banyak menumpahkan darah orang yang tak berdosa “.

Dibandingkan dengan gerakan emansipasi lainnya, SI sangat aktif dan menunjukkan sifat yang luar biasa dinamis. Kegiatan SI praktis dapat dibagi dalam kategori berikut. Pertama, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan para anggota, seperti pembentukan toko – toko koperasi dan usaha lainnya. Inilah kegiatan SI yang paling menonjol dalam periode awal berdirinya. Para anggota dianjurkan mengumpulkan uang untuk membentuk toko – toko koperasi, agar mereka memperoleh kebutuhan sehari – hari dengan harga murah. Di samping itu juga merencanakan proyek yang hebat seperti mendirikan perusahaan bank dan asuransi, serta perusahaan ekspor – impor. Yang dimaksudkan untuk menyaingi kantor dagang Eropa dan Cina. Pada tingkat SI lokal pun terdapat proyek – proyek demikian, tetapi pada umumnya kegiatan ekonomi ini kurang berhasil. Kebanyakan perusahaan itu dalam jangka waktu yang tidak lama jatuh pailit. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengetahuan ekonomi pada pemimpin SI, pengurusan perusahaan yang buruk, terlalu mudahnya memberikan kredit, langkanya modal dan hanya sedikit peredaran. Kadang – kadang juga korupsi dan penyelewengan.

Kedua, meniadakan keluhan dan memperjuangkan perubahan dalam bidang pemerintahan, peradilan, pendidikan umum dan politik keagamaan pemerintah. Bentuk kegiatan untuk meningkatkan derajat rakyat Indonesia ialah memajukan pendidikan yang memekarkan SI. Walaupun usaha ini pada awal periode agak dipinggirkan, karena lebih fokus pada kegiatan ekonomi. Rencana untuk perbaikan pendidikan, berangsur – angsur berkembang dan sesudah tahun 1914 kian mendapat perhatian. Dalam kalangan SI terdapat perhatian yang besar untuk kegiatan pendidikan ini yang diusahakan perkumpulan Arab Djamiatul Khair, yang apada kesempatan pada pertemuan di cabang SI Jakarta, mereka menyampaikan uraian tentang pendidikan dan kemajuan. Dikemukakannya, sekolah-sekolah perkumpulan sebagai contoh bagi SI. Pada perkembangan selanjutnya, banyak didirikan sekolah – sekolah SI, sehingga hal ini menimbulkan adanya kekurangan tenaga – tenaga guru. Sejak tahun 1915 didirikanlah suatu pendidikan guru berdasarkan agama untuk mendidik jenis tenaga pengajar seperti ini, yang merupakan program utama tingkat CSI di bidang pendidikan. Jenis kegiatan

yang dilakukan SI untuk meningkatkan anggotanya dalam memajukan kehidupan beragama. Dengan program yang diusulkan oleh CSI Ardiwinata pada kongres 1916, yang mengusulkan untuk mendirikan langgar – langgar dan menggaji pegawai yang diperlukan untuk ini; menyelenggarakan ceramah soal – soal agama dan menerbitkan karya keagamaan dalam bahasa daerah di Indonesia. Sementara untuk meniadakan keluhan dan mengusahakan perubahan di bidang pemerintahan, peradilan, pendidikan umum dan politik agama pemerintah. Pertama ialah perbaikan dalam pemerintahan desa, karena arti masyarakat desa memiliki arti penting dalam perkembangan politik pemerintahan Indonesia, seperti peningkatan pendidikannya dengan di banggunya sekolah desa yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat petani. Di bidang peradilan, keluhan mengenai pengadilan kepolisian yang di Indonesia dilakukan oleh pamong praja. Hal ini menyebabkan tidak adanya pemisahan antar kekuasaan hakim dan administrasi. Tahun 1914 terjadi perubahan reorganisasi mengenai hal tadi di atas. Tapi menurut CSI pelaksanaan perubahan tersebut masih sangat lambat. Sehingga mereka meminta agar dengan segera melakukan perubahan secara cepat, karena hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian dikalangan rakyat Indonesia.

Yang ketiga, meniadakan keluhan-keluhan dalam bidang keuangan dan ekonomi, dalam kegiatan SI lebih fokus pada masalah pajak dan kerja rodi yang banyak terjadi diluar Jawa. Pada kongres Bandung Tahun 1916, dibicarakanlah masalah tersebut. Berbagai keluhan banyak dikemukakan oleh para peserta. Dan meminta agar pemerintah segera membentuk komite untuk menyelidiki masalah tersebut. Sementara di Jawa sendiri terdapat masalah dan keluhan mengenai tekana dan intervensi oleh perusahaan swasta untuk menyewa tanah mereka dengan harga yang murah kepada pabrik.

Tetapi, sebagian besar kegiatan dan rencana SI ini gagal. Gerakan koperasi tidak banyak hasilnya. Kebanyakan perusahaan pailit. Contoh yang lain, dalam bidang pendidikan. Rencana sekolah guru tidak juga dimulai walaupun telah dikemukakan dengan begitu semangat. Banyak persoalan yang menyebabkan hal tersebut tidak berjalan. Seperti ketiadaan dana dan tidak adanya kader yang mampu.

Bagaimana halnya dengan sukses yng dicapai dalam bidang mengatasi keluh – kesah, persoalan yang merupakan tanggung jawa pemerintah, di sini pun tidak terdapat hasil yang hebat. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak cepat tanggap kepada

permasalahan yang diajukan oleh SI. Akibatnya, banyak pemimpin dan anggota tahun demi tahun menjadi lebih kecewa. Mereka yang belakangan ini menyatakan perasaan kedongkolannya dengan cara meninggalkan gerakan tersebut, hanya sedikit yang diperoleh dari jerih payah yang dilakukan oleh pemimpin – pemimpin SI.

Tindakan permusuhan yang dilakukan oleh para pengikut Sarekat Islam bermacam-macam bentuknya dan berbeda-beda, mulai dari melontarkan ejekan kecil sampai kepada melakukan tindakan-tindakan kekerasan jasmani yang gawat. Ini ditunjukkan baik kepada wakil-wakil golongan penduduk sendiri maupun terhadap golongan penduduk lain, terutama orang cina. Memang konflik antar mereka dan orang-orang SI rata-rata lebih dasyat sifatnya daripada antara pengikut SI dan wakil golongan penduduk yang lain.

Upaya pertama SI untuk melakukan penyebaran adalah dengan membentuk dan menyempurnakan anggaran organisasi pada tahun 1912 di Surabaya. Pada kongres 1913 di Surabaya SI lebih menyempurnakan lagi organisasinya. Selanjutnya di Jawa perkumpulan ini terbagi menjadi tiga cabang utama yang disebut departemen masing-masing yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada juni 1913 SI mendapat badan hukum dari Gubernur Jenderal Idenburg. Luas cabang dari SI biasanya sama dengan luas Kabupaten. Organisasi ini memiliki tingkatan dalam organisasi dan juga penyebarannya semakin kecil lingkungannya semakin rendah tingkatannya.

D. Indische Partij

Keistimewaan IP adalah usianya yang sangat pendek, tetapi anggaran dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker di Bandung pada 25 Desember 1912. IP adalah organisasi campuran yang menginginkan kerjasama orang Indo dan Bumiputera.

Gerakan IP sangatlah mengkhawatirkan pemerintah Kolonial Belanda, karena Indische Partij bersifat radikal dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Keadaan itu yang menyebabkan pemerintah bersikap keras terhadap Indische Partij permohonan Indische Partij untuk mendapatkan badan hukum sia-sia belaka dan organisasi ini dinyatakan sebagai partai terlarang sejak 4 Maret 1913. Para pemimpin IP pun ditangkap dan dibuang ke tempat-tempat yang jauh. Usia IP sangat pendek, namun “bagaikan sebuah

tornado yang melanda Jawa”. Oleh penerusnya setelah IP dibubarkan dan pimpinannya di buang kemudian organisasi itu bernama *Insulinde*.

Pada dekade 1920-an kondisi pergerakan nasional telah mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan tersebut, bukan saja karena usia pergerakan nasional telah belasan tahun, akan tetapi bidang-bidang yang dimasuki oleh kaum pergerakan sudah menekuni bidang-bidang politik yang pada periode sebelum Perang Dunia I tidak banyak dibicarakan, atau lebih tepat dikatakan belum menjadi perhatian utama, kecuali bagi Indische Partij yang sejak awal berdirinya telah cenderung ke arah politik. Sedangkan bagi Boedi Oetomo (BO) dan Sarekat Islam (SI) pada masa pembentukannya belum menyentuh program politik. Sebab-sebab khusus dari pembentukan kedua organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang belum memungkinkan melakukan pembicaraan-pembicaraan politik. Baik BO maupun SI memang orientasinya masih di luar lapangan politik.

Jika membandingkan BO dan SI secara khusus keduanya dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berbeda. Yang pertama dilatarbelakangi oleh mendesaknya bidang pendidikan, sedangkan bagi yang kedua, faktor ekonomi pada mulanya sangat dominan. Oleh karena itu, BO orientasinya ke bidang sosial budaya dengan tujuan “kemajuan yang harmonis buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan dagang, teknik, industri, kebudayaan” (Pringgogigdo, 1980: 1). Sedangkan SI memiliki tujuan “mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong menolong (Pringgogigdo, 1980: 5).

Walaupun keduanya berangkat dari adanya perbedaan-perbedaan, akan tetapi peristiwa Perang Dunia I telah mengubah haluan keduanya. *Indie Weerbaar* yang membawa dampak politik bagi kaum pergerakan, yaitu dibentuknya *Volksraad* merupakan contoh adanya perubahan garis kebijakan organisasi. Di samping itu, BO, SI, *Insulinde*, dan *ISDV* mendirikan *Radicale Concentratie* dalam *Volksraad* yang menuntut dibentuknya Majelis Nasional sebagai “parlemen pendahuluan” untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara.

Radicale Concentratie ini pada hakekatnya merupakan konsentrasi yang pertama pada masa pergerakan nasional. Meskipun anggota-anggotanya terbatas pada beberapa organisasi, akan tetapi konsentrasi tersebut telah melakukan hal-hal yang terbaik

khususnya bagi kaum pergerakan, dan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Tambahan pula, badan tersebut merupakan cikal bakal bagi berdirinya konsentrasi nasional pada decade berikutnya.

Beberapa kejadian penting yang melatarbelakangi pendirian konsentrasi nasional adalah apa yang dikatakan Kartodirdjo (1990), sebagai radikalisme pergerakan nasional. Radikalisme ini oleh Pringgogidjo (1980: 25), terlihat pertama kali ketika pada tanggal 23 Mei 1920 berdiri Partai Komunis Indonesia (PKI). Pendirian PKI sendiri sesungguhnya banyak didukung oleh *Komunistische Internationale* pasca Revolusi Rusia. Oleh karena itu, sesuai dengan sikap dan aksi gerakan, PKI dengan orang-orangnya yang mantan anggota SI yang dipecat karena berlakunya disiplin partai, dalam gerakan radikalismenya bukan cuma ditujukan kepada pemerintah kolonial, akan tetapi juga ditujukan kepada organisasi lain. Pada kongres istimewa, 24 Desember 1920, Semaun sebagai pemimpin PKI menuduh SI sebagai pergerakan rakyat yang menyokong kapitalisme (Pringgogidjo, 1980: 26).

Aksi-aksi PKI yaitu mencapai puncaknya pada tahun 1926 dengan melakukan pemberontakan. Pringgogidjo (Pringgogidjo, 1980: 32) menulis, kaum komunis melakukan pemberontakan di Jakarta dan Tangerang (12 – 14 November 1926), di Banten (12 November – 5 Desember 1926), di Priangan (12 – 16 November 1926), di Solo (17 – 23 November 1926), di Kediri (12 November – 15 Desember 1926), dan baru pada tahap rencana untuk daerah-daerah Banyumas, Pekalongan, dan Kedu. Sedangkan di Sumatera pemberontakan ini biasa disebut Pemberontakan Silungkang, Januari 1927 (Dimjati, 1951: 23).

Meskipun pemberontakan itu gagal, akan tetapi dampaknya sangat besar, yang kena hukuman pembuangan ke Digul misalnya, bukan hanya orang-orang PKI, melainkan banyak anggota pergerakan yang bukan PKI terkena getahnya. Akibat pemberontakan itu pula PKI beserta *onderbouw*-nya dilarang Pemerintah Kolonial. Bagi PKI sendiri, tidak ada kata menyesal atas kegagalan itu; tidak ada korban yang percuma (Dimjati, 1951: 25).

Terlepas dari aktivitas yang dilakukan PKI, Pemerintah Kolonial melakukan berbagai tindakan yang reaksioner. Sebagaimana dikatakan di atas, banyak orang yang bukan komunis pun ditangkap dan dibuang. Hal ini berarti ada jalan bagi Pemerintah

Kolonial untuk bertindak semena-mena terhadap kaum pergerakan. Dalam artian, bahwa Pemerintah Kolonial mencari-cari kesalahan siapa saja yang menentang kebijakannya.

Sementara itu, hal yang tidak bisa dikesampingkan juga dalam periode ini adalah kebijakan Gubernur Jenderal (GJ) yang memerintah selama dasawarsa ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebijakan GJ dan terutama mengenai sikapnya terhadap kaum pergerakan akan memperjelas kondisi pergerakan nasional selama tahun-tahun 1920-an.

Sepeninggal G.J. Van Limburg Stirum (1916 – 1921) yang terkenal dengan *November belofte*-nya, Hindia Belanda diperintah oleh G.J. Mr. Dirk Fock (1921- 1926). Gubernur Jenderal yang baru ini sengaja didatangkan ke Batavia dalam rangka mengatasi masalah keuangan dan politik. Dalam bidang keuangan, G.J. Van Limburg Stirum dianggap sebagai Gubernur Jenderal yang gagal karena borosnya pengeluaran uang. Karena keborosannya, pada akhir jabatannya dalam keadaan yang rugi, sehingga harus menutupi kekurangan itu dengan sejumlah uang yang tidak sedikit (Koch, 1951: 93 – 94). Namun demikian, keadaan yang demikian itu juga tidak sepenuhnya merupakan kesalahannya sendiri, melainkan kebijakan atasannya, Menteri Simon de Graaf yang tidak menggubris rencana Van Limburg Stirum untuk melakukan perubahan dalam pengaturan pemungutan pajak. Adapun usul Van Limburg Stirum itu baru di laksanakan oleh de Graaf setelah Van Limburg Stirum habis masa jabatannya.

Kedaaan keuangan ini nyata sekali sangat menguntungkan Dirk Fock. Berdasarkan komisi penyeidik mengenai tekanan atas pajak terhadap rakyat Jawa dan madura, maka sejak tahun 1922 pemerintah telah mendapat keuntungan yang besar. Komisi yang diketuai oleh Meyer Ranneft-Huender (Koch, 1951: 94 – 97) melaporkan bahwa, pajak yang dipungut dari rakyat dalam tahun 1919 – 1920 hanya sebesar f 23,5 – f 24 juta. Sedangkan tahun 1922 naik menjadi f 28,1 juta; tahun 1923 mencapai f 31,7 juta dan tahun 1924 memperoleh f 32,8 juta. Angka-angka di atas merupakan jumlah yang besar karena memang di balik penderitaan rakyat itu, pemerintah memungut pajak rata-rata 4 % dari penghasilan untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan sampai 5 % atau rata-rata 10 % untuk Pulau Jawa dan Madura. Di samping intensifikasi pajak, keuntungan yang diperoleh pemerintah menunjukkan angka kenaikan, yaitu dari f 32,8 juta pada tahun 1919 menjadi f 59,3 juta pada tahun 1924. bahkan, keuntungan dari

minyak, kayu api, dan tembakau kenaikannya mendekati 100%, yaitu sebanyak f 13,3 pada tahun 1919 juta, sedangkan pada tahun 1924 keuntungan mencapai f 24,9 juta.

Selanjutnya, Komisi Meyer Ranneft itu melaporkan bahwa, kenaikan finansial yang diperoleh itu tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sungguh ironis sekali, ketika rakyat sedang tertindas oleh beratnya berbagai kewajiban, termasuk pajak, pemerintah malah ingin segera menutupi kekurangan anggaran. Akibatnya, semakin lebarlah *gap* antara Nederland dan Hindia Belanda. Seorang anggota Volksraad, Wessing, dalam sidang tahun 1926 menggambarkan kondisi keuangan Hindia Belanda bahwa, jika dipandang dari kas negara, boleh dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan hal yang semestinya. Akan tetapi, janganlah lupa bahwa, keuntungan yang diperoleh dengan menjerumuskan rakyat ke lembah kemiskinan (Koch, 1951: 94 – 97).

Dari laporan di atas, jelas sekali bahwa, kebijakan G.J. Dirk Fock itu benar-benar telah membawa kesengsaraan bagi rakyat. Hal itu dilakukan juga pada bidang politik. Dalam bidang tersebut, dia terkenal sebagai seorang yang bertangan besi. Meskipun pada mulanya ia menamakan seorang *etisch*, akan tetapi pada kenyataannya bertolak belakang dengan idealismenya. Sebagai contoh dapat dikatakan kritiknya terhadap GJ Van Limburg Stirum bahwa, segala kekacauan dan kegelisahan yang terjadi di Hindia Belanda adalah karena ucapan pemerintah yang tidak masuk akal. Pernyataan Van Limburg Stirum yang menjanjikan perubahan dalam struktur Volksraad pada tanggal 18 November 1918 – *November belofte* dikritik Dirk Fock sebagai telah membangkitkan semangat rakyat untuk memberontak. Ucapannya itu dilaksanakan secara nyata pada masa pemerintahannya dengan membungkam berbagai gejolak: pemogokan-pemogokan buruh buruh antara tahun 1922 dan 1923, baik di pegadaian maupun pegawai kereta api segera ditumpasnya. Demikian pula pada tahun 1925 terhadap pemogokan pegawai pabrik mesin kapal di Surabaya. Akibatnya, Dirk Fock mengeluarkan instruksi kepada setiap residen yang disebut “mandate blanko” yang tujuannya boleh melakukan tindakan seperlunya tanpa harus menunggu perintah Gubernur Jenderal, gambaran di atas menunjukkan Dirk Fock sebagai GJ yang reaksioner terhadap kaum pergerakan nasional dan kemajuan rakyat Hindia Belanda.

Sementara itu, pengganti Dirk Fock adalah Mr. Andries Cornelis Dirk de Graeff, seorang GJ bangsawan yang berperasaan halus. Oleh karena itu, kebijakannya diharapkan tidak seperti pendahulunya, demi menarik simpati rakyat Hindia Belanda. Seperti yang dijelaskan di atas, Dirk Fock telah banyak mengorbankan rakyat. Sebaliknya, de Graeff berpendirian bahwa, dia akan memperkenankan kehendak kaum nasionalis asal tidak membahayakan Nederland.

Akan tetapi, ketika baru beberapa bulan bertugas, dan terjadi pemberontakan yang dilakukan PKI, maka de Graeff segera mengambil tindakan yang sangat bertentangan dengan pendiriannya semula. Bahkan, sesungguhnya dialah yang menciptakan pembuangan Digul, di samping menghukum mati beberapa pemberonyak (Koch, 1951: 117). Kejadian ini merupakan suatu pertanda bahwa, idealisme setinggi apa pun untuk memajukan rakyat Hindia Belanda, khususnya kaum pergerakan nasional, tidak pernah terjadi karena semua Gubernur Jenderal mempunyai tugas yang sama, yaitu menomorsatukan kepentingan Kerajaan Belanda. Konsekuensinya adalah setiap pergerakan yang ada, yang sudah tentu membahayakan pemerintah kolonial, akan ditumpas. Kebijakan lain yang sangat nyata adalah penangkapan terhadap para pimpinan PNI, Ir. Soekarno dan kawan-kawan yang dianggap sebagai orang-orang radikal.

Walaupun demikian, pada dasawarsa 1920-an ini ada beberapa kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehendak untuk bersatu di kalangan kaum pergerakan muncul pada bulan September 1926 melalui Komite Persatuan Indonesia, yang di dalamnya bergabung *studieclub-studieclub*, SI, Muhammadiyah, JIB, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Tantangan yang datang dari pemerintah kolonial yang reaksioner merobek-robek persatuan Indonesia dijawab dengan munculnya konsentrasi nasional pada pertengahan Desember 1927, Permusyawaratan Perhimpunan Partij-partij Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang dipelopori oleh PNI. Di samping itu kalangan pemuda menyelenggarakan kongres tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, juga pada tanggal 27 Januari 1930, Moh. Husni Thamrin dalam *Volksraad* mendirikan Fraksi Nasional. Kesemuanya itu merupakan upaya kaum nasionalis dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial. Kondisi ini, sudah barang tentu, menjadi preseden bagi pergerakan Nasional periode 1930-an.

E. Partai Nasional Indonesia

Latar belakang didirikannya PNI adalah akibat dari situasi sosio-politik serta pasca dilarangnya kegiatan yang berbau komunis, pada tahun 1927 berdirilah PNI yang dipelopori oleh Soekarno dan mayoritasnya anggotanya berasal dari Algemene Studie Club Bandung yang merasa aspirasinya tidak tersalurkan pada organisasi lain. Tujuan PNI pada waktu adalah mencapai Indonesia merdeka, dengan asas self help atau berdikari, nonkoperasi, serta marhaenisme. Dalam perjuangannya seringkali PNI melalui Soekarno sebagai penarik massa karena kelihaiannya akan berorasi mampu membuat PNI menjadi organisasi yang banyak pengikutnya, selain itu Soekarno pun selalu membuat propaganda yang mampu membakar semangat rakyat seperti perlunya menghilangkan ketergantungan pada pemerintah kolonial, serta perlawanan antara front kulit putih dengan sawo matang.

Propaganda yang sering dilancarkan Soekarno membuat pemerintah kolonial khawatir sehingga gubernur jenderal pada sidang Volkraad memberi PNI peringatan agar jangan terlalu radikal, namun pada sekitar tahun 1929 tersebar fitnah bahwa PNI akan memberontak sehingga mengakibatkan penangkapan tokoh-tokohnya. Soekarno sebagai salah satu yang ditangkap menuliskan pembelaannya sehingga dikenal sebagai Indonesia Menggugat. PNI pun akhirnya dibubarkan namun setelah terjadi perpecahan sehingga terbentuklah partai baru Partindo dan PNI baru.

Tahun 1926 Soekarno menamatkan studinya dari THS. Meski tidak bekerja secara teknis dalam bidangnya, bukan berarti dia vakum dalam mengembangkan ilmu yang dengan susah payah dia dapatkan dari THS. Sukarno tetap memunculkan keberhasilan-keberhasilan dalam pengembangan ilmu arsitektur dan bangunan. Untuk menutupi kebutuhan keluarga, Sukarno bersama-sama Anwari pada 1926 mendirikan biro teknik. Tetapi, biro yang mereka dirikan tidak berhasil dengan baik karena perhatian dan pikiran mereka tertuju dalam bidang politik dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia.

Study club-study club tersebut menguat pada 1926, dan pada saat itu Sukarno menjadi ketuanya. Study club ini menguat dan memunculkan sebuah perkumpulan politik yang kemudian dinamakan partai.

Lahirnya PNI dinilai sebagai peningkatan semangat perjuangan kemerdekaan, mengingat beberapa faktor yang mendorongnya. PNI didirikan dengan tujuan mencapai

Indonesia merdeka dengan asas yang dinamakan Marhaneisme, menolong diri sendiri dan non kooperasi. Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah massa aksi nasional yang sadar dan percaya pada kekuatan sendiri.

Perjalanan sejarah politik indonesia di era 1920-an ini tidak lepas dari kekuatan ideologi mahasiswa seperti Hatta, Syahrir, dan generasi seangkatannya yang belajar di Belanda. Sejak tahun 1919 Hatta bersama pelajar lainnya aktif dalam sebuah perkumpulan pelajar yang kemudian berubah menjadi organisasi berhaluan politik PI. Sukarno sendiri brgitu aktif mengikuti perkembangan para pemuda yang ada di Belanda. Tidak jarang dia berkorespondensi dengan Hatta untuk saling bertukar pendapat mengenai kegiatan politik mereka.hal inilah yang kemudian memunculkan ide jauh Sukarno untuk mendirikan PNI.

Pada 24 Mei 1929, PNI mempunyai pimpinan yang terdiri dari Sukarno (ketua), Isqaq (Sekertaris), Sartono (Bendahara). Bulan November 1929 yang menjdi pimpinan pusat adalah Sukarno, Gatot Mangkoepraja, Manadi, dan Maskoen. Untuk merealisasikan tujuannya, PNI melakukan berbagai macam upaya. Upaya tersebut dikumandangkan dalam Kongres Pertama di Bandung dan memuat beberapa agenda antara lain :

1. Politik

2. Memperkuat perasan kebangsaan dan perasaan persatuan Indonesia.
3. Menyebarkan pengetahuan dan ilmu tentang sejarah nasional dan memperbaiki hukum nasional.
4. Mempererat perhubungan antar bangsa-bangsa di Asia.
5. Menuntut kemerdekaan diri, kemerdekaan pers, dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

2. Ekonomi

1. Berusaha mencapai perekonomian nasional yang dapat berdiri sendiri.
2. Menyokong perdagangan dan perindustrian nasional.
3. Mendirikan bank nasional dan koperasi-koperasi untuk mencegah riba.

4. Sosial

1. Memajukan pengajaran nasional.

2. Memperbaiki kedudukan perempuan.
3. Memajukan sarakat-sarakat buruh dan tani.
4. Memperbaiki kesehatan rakyat.
5. Mengajukan monogami (mempunyai hanya seorang istri).

Dalam perkembangannya, terdapat pro dan kontra tentang pertumbuhan PNI, satu pihak memandang PNI cepat berkembang, tetapi banyak pula yang mengatakan bahwa PNI bukanlah partai yang sukses jika dilihat dari kualitas massa. Kalau dicermati secara seksama, tampak bahwa perkembangan PNI jauh lebih lambat dari SI. Bagi Sukarno yang saat itu menjadi ketua partai, persoalan jumlah anggota baginya tidak terlalu penting.

Berkat upaya dan perjuangan keras dari Sukarno serta dukungan dari Inggit Garnasih, PNI mampu tercatat sebagai partai garis depan di era 1920-an. Untuk membesarkan PNI tidak mudah seperti yang diangnakan. Kendatipun Sukarno pandai menghimpun massa dengan kekuatan dan gaya pidatonya, massa masih juga sedikit. Disamping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Sukarno kadang-kadnag merasa kesulitan memahami bahasa sunda.

F. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

PPPKI terbentuk sebagai akibat dari kesadaran yang mulai muncul bahwa kekuatan pergerakan nasional mesti dibenahi dan harus segera dibentuk front kesatuan sebagai bentuk koordinasi bersama dalam menghadapi pemerintah kolonial, koordinasi diperlukan sebab tidak mungkin masing-masing masih mengejar kepentingan sendiri.

Soekarno pun setuju untuk membentuk front bersama dan merasa yakin bahwa persatuan kesatuan bisa diwujudkan dan perjuangan kemerdekaan pun akan mudah terlaksana, beberapa organisasi pun mulai bergabung, sempat ide ini ditolak oleh sebagian organisasi karena Soekarno dianggap sebagai hasil didikan Belanda sehingga rasa nasionalisme Soekarno diragukan.

Setelah melalui beberapa kendala akhirnya pada tahun 1927 dibentuklah PPPKI (pemufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan indonesia) organisasi ini menampung beberapa organisasi seperti PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi.

PPPKI pun semakin berkembang dan rutin mengadakan kongres bahkan Soekarno pun sempat menjadi ketua majelis pertimbangan PPPKI akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata PPPKI tidak mampu mewujudkan cita-cita idealnya hal ini dikarenakan adanya pertentangan antara Partindo dan PNI baru yang mana semakin melemahkan PPKI, dan intervensi dari pemerintah Belanda pun ikut menjadi faktor lemahnya PPPKI.

Sebagaimana dijelaskan pada bab yang lalu, bahwa pergerakan nasional pada decade 1920-an ditandai, antara lain, dengan adanya persaingan di antara kaum pergerakan nasional sendiri dan penempatan gubernur jenderal yang reaksioner. Namun demikian, dalam situasi seperti itu kaum nasionalis terus berupaya untuk terus mempertahankan keberadaannya, bahkan meningkatkan perjuangannya.

Atas dasar itulah, maka kaum nasionalis mencoba menyatukan persepsi: bersatu untuk melawan penjajah, menuju kemerdekaan. Satu hal yang perlu diperhatikan dari kondisi kaum pergerakan nasional adalah sifatnya pluralistic. Sifat ini kemudian menjadi karakteristik pergerakan pada decade ini. Adanya perbedaan golongan, kepentingan, sikap dan orientasi perjuangan merupakan asset sekaligus juga tantangan; betapa majemuknya kekuatan yang ada pada satu pihak, sedangkan pada pihak lain tak akan terelakkan lagi betapa rapuh (fragile) kebinekaan itu.

Satu upaya yang telah dicapai pada periode 1920-an adalah adanya keinginan kaum pergerakan untuk mewujudkan asas persatuan Indonesia. Atas inisiatif studieclub yang ada di Bnadung dan Surabaya pada bulan Desember 1926 didirikanlah Komite Persatuan Indonesia. Organisasi-organisasi yang masuk ke dalam komite ini adalah semua studieclub, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Jong Islamieten Bond, Psundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Akan tetapi, komite ini tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan semula (Pringgodigdo, 1980: 74).

Adalah Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 pimpinan Ir. Soekarno dan beberapa orang bekas anggota Perhimpunan Indonesia, berupaya mewujudkan impian Komite Persatuan Indonesia yang tidak pernah tercapai. Setelah bekerja sama dengan Dr. Sukiman (PSI) dalam membuat peraturan sementara, maka Ir. Soekarno (PNI) memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan Partij-partij Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 17 Desember 1927 (Noer, 1996:

271). Partai-partai yang terhimpun dalam permufakatan tersebut adalah PNI, PSI, BO, Pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub, Sarekat Madura, Tirtajasa, dan Perserikatan Celebes.

Konsentrasi nasional PPPKI ini bertujuan sebagai berikut.

- (1) menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi dengan bekerjasama antaranggotanya.
- (2) Menghindarkan perselisihan antaranggotanya.

Atas dasar itu, maka di dalam konsentrasi itu tidak akan diperbincangkan masalah asas dan faham-faham partai yang bergabung (Pringgodigdo, 1980: 74). Dengan demikian, melalui PPPKI ini solidaritas antarorganisasi yang menjadi tuntutan pokok dapat dilaksanakan (Kartodirdjo, 1990: 158).

Dalam Anggaran Dasar PPPKI juga disebutkan bahwa, rapat-rapat diadakan jika ada keperluan mendadak yang pelaksanaannya sekurang-kurangnya setahun sekali. Sedangkan badan yang tetap dari permufakatan ini adalah Majelis Pertimbangan yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil-wakil partai.

Kongres pertama PPPKI dilakukan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1928 di Surabaya. Keputusan yang sangat penting dari kongres ini adalah mosi “dari rakyat kepada rakyat”, dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan pergerakan. Dalam mosi ini dijelaskan tentang hal-hal berikut.

- (1) dalam berpropaganda untuk organisasi sendiri, anggota PPPKI tidak boleh menyalahkan asas-asas atau tujuan anggota yang lain.
- (2) Tidak boleh mempergunakan kata-kata yang sekiranya akan menyinggung perasaan orang lain.
- (3) Segala perselisihan antarsesama anggota PPPKI harus diselesaikan dengan jalan perundingan.

Pada tanggal 25 – 26 Desember 1928 di Bndung, PPPKI mengadakan rapat dengan mengambil keputusan sebagai berikut.

- (1) akan menjalankan aksi yang kuat untuk menentang segala pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang merintangi orang-orang menyatakan pikirannya dengan merdeka dan merintangi aksi lain-lainnya.

- (2) Akan menuntut supaya para interniran yang tidak berdosa di Digul agar dibebaskan.
- (3) Akan membentuk suatu panitia untuk pengajaran (sekolah) kebangsaan.
- (4) Akan menyerahkan memorandum tentang peraturan *punale sanctie* terhadap kuli kontrak kepada Albert Thomas, Ketua Konferensi Perburuhan Internasional, Genewa, bila ia datang ke Indonesia (Persatuan Indonesia, 1 – 7 – 1928).

Mosi-mosi di atas dilatarbelakangi oleh tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap para aktivis pergerakan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa, dalam peraturan tentang menjalankan hak berserikat dan berkumpul di Indonesia dijelaskan, antara lain, bahwa untuk mendirikan suatu perserikatan tidak usah mendapat ijin dari pemerintah. Dijelaskan pula mengenai perserikatan yang terlarang yaitu jika pendiriannya dirahasiakan dan jika yang berwajib menerangkan bahwa perserikatan itu berlawanan dengan keamanan umum.

Akan tetapi dalam kenyataannya, setiap perserikatan atau perkumpulan itu harus mendapat ijin terlebih dahulu. Di samping itu, penguasa dengan semena-mena menuduh seseorang atau badan yang dianggap melanggar pasal-pasal “karet” karena mengganggu *rust en orde* keamanan dan ketertiban. Hal ini sering terjadi terhadap seseorang yang dianggap anti pemerintah, sehingga dengan dalih apapun kasum pergerakan akan tetap dipersalahkan.

Pada konferensi di Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 29 – 30 Maret 1929, PNI menganjurkan agar Perhimpunan Indonesia (PI) dijadikan pengawal terdepan di Eropa. Hal ini penting sekali karena hal-hal berikut.

- (1) agar bangsa-bangsa di Eropa mengetahui secara pasti peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi di Indonesia.
- (2) Sebaliknya, agar PPPKI mengetahui kondisi politik di Eropa yang tentu ada kepentingannya dengan Indonesia.

Pada kongres di Solo, 25 – 27 Desember 1929, PPPKI kembali mengemukakan mosi “dari rakyat dan untuk rakyat”, antara lain, sebagai berikut.

- (1) membuat panitia penyelidikan pergerakan sekerja.
- (2) Buruknya penahanan lama-lama oleh polisi tas kaum poitisi.

- (3) Tidak sahnya larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota partai nasional.
- (4) setiap orang yang tidak menghormati persatuan Indonesia adalah musuh Indonesia.
- (5) Pembentukan fonds nasional untuk meningkatkan propaganda di dalam dan di luar negeri.

Sementara itu, sehubungan dengan adanya penggeledahan terhadap para pimpinan PNI (29 Desember 1929), PPPKI memprotes penggeledahan itu (12 Januari 1930). Di samping itu, memperkuat dukungan terhadap fonds nasional untuk membantu keluarga yang sedang dalam tahanan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah mosi “dari rakyat untuk rakyat”, dalam kondisi apa pun pergerakan akan tetap ditingkatkan untuk meneruskan aksi menuju kemerdekaan. Bagaimanapun pada masa itu terjadi pengawasan pemerintah yang berlebihan, baik terhadap perorangan maupun terhadap organisasi.

Seperti dikemukakan pada bagian yang lalu bahwa, benih-benih keretakan telah nampak ketika permufakatan ini mulai berdiri. Pertentangan pun tak dapat dielakkan lagi, sehingga pada bulan Desember 1930 PSI ke luar dari PPPKI. Di samping itu, juga adanya perpecahan dalam Partindo dan PNI Baru. Meskipun kedua organisasi ini berasal dari PNI (lama), akan tetapi ketika Ir. Soekarno dan kawan-kawan dipenjara, terjadilah dua kubu kekuatan yang satu dan lainnya tidak dapat dipersatukan kembali. Polarisasi ini lebih jelas lagi ketika Ir. Soekarno memiik Partindo, sedangkan Drs. Moh. Hatta memiik PNI Baru.

Namun demikian, PPPKI berupaya mempertahankan diri baik dari keretakan dalam federasi maupun karena reaksi dari penguasa. Untuk mewujudkan cita-citanya, PPPKI meakukan hal-hal berikut.

- (1) mengganti nama permufakatan menjadi persatuan; kebangsaan menjadi kemerdekaan.
- (2) Memindahkan Majelis Pertimbangan dari Surabaya ke Jakarta.
- (3) Melakukan berbagai aksi untuk menentang kebijakan pemerintah dalam hal berserikat, hokum pidana, dan hak-hak luar biasa pemerintah atas pengasingan.

Ketiga upaya di atas diharapkan akan memperkuat pergerakan, sehingga dengan demikian berbagai partai politik yang ada tidak dipaksa untuk mufakat, melainkan diusahakan cara-cara yang demokratis sesuai dengan latar belakang setiap parpol. Adapun pemindahan Majelis pertimbangan ke Jakarta, mengingat bahwa Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan tempat berdirinya berbagai organisasi pergerakan. Sedangkan hal yang terakhir adalah upaya PPPKI dalam rangka membela para pemimpin pergerakan yang pada masa itu diasingkan, antara lain, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Sutan Sjahrir.

Sementara itu, pada paruh kedua decade 1930-an karena reaksi dari pemerintah colonial, PPPKI tidak bias mempertahankan aksinya lagi. Tambahan pula, upaya-upaya Ir. Soekarno untuk memperbaiki dan mendorong aksi-aksi PPPKI tidak bias dilakukan lagi. Kondisi ini menyebabkan sikap pergerakan mencari format baru dalam mempersatukan partai-partai yang ada melalui Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

G. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI – Baru)

Lahirnya PNI baru adalah usaha untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan akibat pembubaran PNI dan pembentukan Partindo, pelopor dari terbentuknya PNI baru adalah Moh Hatta dan Sutan Syahrir dengan kepemimpinan dua tokoh tersebut anggota dari PNI baru meningkat terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur sama seperti sebelumnya agenda nasionalisme tetap menjadi wacana utama dan peningkatan pendidikan secara merata serta tidak menghendaki pemerintahan yang dipimpin oleh kaum ningrat, karena pemerintahan selazimnya dipimpin oleh rakyat.

Antara Partindo dan PNI baru terdapat perbedaan dimana masyarakat menganggap Partindo sebagai partainya Soekarno dan PNI baru sebagai partainya Hatta Syahrir, sehingga bila dilihat dari golongan sosial Partindo adalah partai bangsawan dan PNI baru adalah partai golongan bawah.

Tahun 1934 Partindo, PNI baru dilarang melakukan kegiatan politik dan rapat-rapat, disusul penangkapan dan pembuangan tokoh-tokohnya. Soekarno dibuang ke Ende Flores, Hatta dan Syahrir dibuang ke Boven Digul. 10 September 1935 sebelum Sjahrir datang ke Digoel, disana diasingkan orang-orang yang disebut komunis. Mengenai mereka yang pertama diasingkan sebagian besar dari mereka yang ketika itu di bawah

komando PKI melakukan pemberontakan dengan mentalitas yang sama seperti apabila orang mengikuti seorang raja atau seorang penipu yang mengatakan dirinya nabi.

H. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan yang lalu, kepasifan PPPKI menyebabkan tenggelamnya persatuan itu. Oleh karena itu, diperlukan wadah baru untuk merapatkan barisan dalam menentang penjajah Belanda. Hal ini ditempuh karena beberapa sebab. Pertama, tidak adanya keputusan yang bersifat politik baik dari MIAI sebagai organisasi religius maupun Parindra dari non religius (Kartodirdjo, 1990: 185). Kedua, “tersumbatnya” Volksraad dalam mengeluarkan aspirasi Bangsa Indonesia melalui kaum pergerakan. Mandegnya fraksi nasional dan ditolaknya Petisi Soetardjo merupakan contoh dari kegagalan ini. Ketiga, kegagalan Badan Perantaraan Partai-partai Politik Indonesia (BAPEPPI) dalam melaksanakan programnya. Keempat, melalui heterogenitas Indonesia dikumandangkan rencana Colijn untuk membentuk negara-negara pulau sebagai reaksi dari politik *divide et impera*.

Selain faktor-faktor di atas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah situasi internasional pada saat itu. Alasan ini pula yang melatarbelakangi inisiatif Husni Thamrin (Parindra) mengadakan rapat tanggal 19 Maret 1939 untuk mendirikan badan konsentrasi yang baru. Sebagai realisasi dari rapat di atas, maka pada tanggal 21 Mei 1939 diadakan rapat umum yang menghasilkan pembentukan konsentrasi nasional, Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Sesuai dengan anggaran dasarnya tujuan GAPI adalah:

- 1) Menghimpun organisasi-organisasi politik bangsa Indonesia untuk bekerja bersama-sama.
- 2) Menyelenggarakan kongres Indonesia.

Pada bagian lain anggaran dasarnya disebutkan, bahwa Gabungan Politik Indonesia berdasarkan kepada beberapa hal berikut.

- 1) Hak untuk menentukan dan mengurus nasib bangsa sendiri.
- 2) Persatuan Nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasar kerakyatan dalam paham politik.
- 3) Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.

Meskipun persatuan nasional merupakan dasar aksi GAPI, akan tetapi dalam kenyataannya perpecahan dalam tubuh kaum pergerakan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimanapun hal ini akan mempengaruhi bahkan menghambat pencapaian tujuan GAPI. Perpecahan tersebut terlihat ketika berdidinya Golongan Nasional Indonesia di samping adanya Fraksi Nasional. Di samping itu, di antara anggota-anggota pun terdapat perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Terdapatnya anggota-anggota GAPI, Parindra, PSII, PII, Pasundan dan Gerindo yang mempunyai konflik: PII Sukiman dengan PSII Abikusno; Gerindo dengan Moh. Yamin.

Sementara itu perpecahan kaum pergerakan tidak menjadi penghalang utama bagi GAPI untuk melakukan aksi-aksinya. Pada rapatnya tanggal 4 Juli 1939 GAPI memutuskan pendirian Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Pembentukan kongres ini merupakan pelaksanaan program GAPI. Disamping itu GAPI melakukan aksi Indonesia Berparlemen. Dengan aksi ini diharapkan pemerintah Nederland memberi peluang untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat melalui Kongres Rakyat Indonesia. Tujuan ini dikemukakan berhubung dengan timbulnya Perang Dunia II. Bertalian dengan hal di atas, GAPI juga menawarkan hubungan kerja sama Indonesia dengan Belanda, dengan harapan adanya perhatian Belanda terhadap aspirasi rakyat Indonesia. Hal ini untuk merealisasikan keputusan-keputusan konferensi GAPI yang dilangsungkan pada tanggal 19 dan 20 September 1939, antara lain sebagai berikut.

- 1) Perlunya dibentuk parlemen yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh rakyat, pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen itu.
- 2) Jika keputusan no. 1) dipenuhi, maka GAPI akan memaklumkan kepada rakyat untuk mendukung Belanda.
- 3) Anggota-anggota GAPI akan bertindak semata-mata dalam ikatan GAPI (Pringgodigdo, 1980: 145).

Dalam berbagai konferensi dan resolusi, GAPI ternyata tetap mendesak pemerintah agar mengadakan parlemen sejati; bagaimanapun Volksraad yang ada tidak representatif bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, aksi-aksi GAPI “Indonesia Berparlemen” merupakan program yang terus-menerus dan disebarluaskan kepada semua partai baik anggota GAPI maupun anggota Kongres Rakyat Indonesia. Tambahan pula,

bahwa GAPI sebagai badan pekerja KRI itu sudah menjadi kewajiban GAPI untuk mempropagandakannya oleh semua Komite Indonesia Berparlemen di seluruh Indonesia.

Tuntutan GAPI, Indonesia Berparlemen, ternyata kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan status kenegaraan Indonesia akan dibicarakan setelah selesai perang. Kondisi Belanda yang diduduki Jerman sejak bulan Mei 1940 ini tentu merupakan salah satu alasan bagi pemerintah Belanda. Dan ketika pemerintah Netherland menjadi *Exile Government* di London ini berarti semakin menjauhkan hubungan Indonesia dengan Belanda.

Akan tetapi desakan yang terus-menerus dari GAPI “Indonesia Berparlemen” telah memaksa Belanda membentuk suatu panitia “*Commisie tot bestudering van staatrechtelijke hervormingen*” (Panitia untuk mempelajari perubahan-perubahan tata negara). Panitia yang biasa disebut *Commisie Visman* -nama ketuanya Visman- ini dibentuk pada bulan November 1940 dan laporannya ke luar tahun 1942 (Pringgodigdo, 1980: 196). *Commisie Visman* sendiri meminta keterangan dari GAPI untuk melakukan penjelasan mengenai Indonesia Berparlemen.

Melalui rapat Pleno GAPI pada tanggal 31 Januari 1941, aksinya GAPI mengajukan memorandum yang isinya sebagai berikut:

A. Bentuk dan Susuna Parlemen.

1. Parlemen yang dicita-citakan oleh GAPI terdiri dari dua majelis, Majelis Pertama (*Eerste Kamer*) dan Majelis Kedua (*Tweede Kamer*).
2. Hak anggota kedua Majelis diberikan pada penduduk Negara (*Staatsburger*) baik laki-laki maupun perempuan.
3. Semua anggota dipilih:
 - a. Rapat Majelis Pertama, menurut aturan yang akan ditentukan, aturan mana harus memberi tanggungan, supaya golongan-golongan atau aliran-aliran (*groepelingen en stromingen*) dalam masyarakat mendapat perwakilan yang pantas dan adil.
 - b. Buat Majelis Kedua oleh rakyat (*staatsburger*).
4. Penduduk Negara terdiri pada dasarnya dari “*Netherlandsh Onderdaan*” yang sekarang.

5. Pemilihan dari anggota majelis kedua dilakukan atas dasar berimbangan (evenredigheid) dan pembagian dalam daerah-daerah (regional).
6. Hak memilih adalah umum dan langsung.
7. Hak memilih pada azasnya diberikan kepada tiap-tiap penduduk Negara.
8. Jumlah anggota Majelis Pertama dan Majelis Kedua adalah masing-masing sedikitnya 100 dan 200.
9. Parlemen adalah kekuasaan Pembikin Hukum yang tertinggi.
10. Parlemen menentukan semua peraturan yang mengenai kepentingan negara.

B. Bentuk Indonesia Berparlemen.

1. Indonesia adalah suatu negara dikepalai oleh seorang Kepala Negara (*Staatshoofd*).
2. Kepala Negara mempunyai hak veto (meminta dan menolak usulan parlemen), dan tidak memberi pertanggungjawaban kepada parlemen (*ouschenbaar*).
3. Menteri-menteri menanggung jawab.
4. Kekuasaan buat buat menjalankan pemerintahan adalah pada Kepala Negara.
5. Kepala Negara mengangkat dan melepas menteri-menteri sesudah bermusyawarah dengan parlemen.
6. Kepala Negara dibantu oleh satu badan penasehat Raad Van Staat yang anggotanya diangkat dan dilepas oleh Kepala Negara.
7. Indonesia dan Netherland menjadi satu serikat negara (*Statenbond*).

C. Daya upaya untuk menciptakan Indonesia Berparlemen.

1. Harus diadakan perubahan-perubahan tata negara dalam arti kata kemajuan dalam susunan tata negara.
2. Langkah-langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah luhur (*Oppersbestuur*) c.q. Pemerintah Hindia Belanda (*Indische Regering*).
 - a. Mengangkat seorang Gubernur Jenderal bangsa Indonesia.
 - b. Mengangkat seorang onserdirektur bangsa Indonesia buat tiap-tiap departemen c.q. menambah tenaga Indonesia dalam pimpinan departemen-departemen.
 - c. Mengangkat lebih banyak bangsa Indonesia di dalam Raad van Indie.

- d. Mengangkat Majelis Rakyat (*volkskamer*) di samping Volksraad yang sekarang.
 - e. Melakukan pemilihan-pemilihan buat anggota-anggota Majelis Rakyat, menurut aturan pemilihan umum dan langsung atas dasar pertimbangan (*evendigheid*) dan pembagian dalam daerah-daerah (*regional*).
 - f. Memberikan hak dua memilih dan buat dipilih buat pemilihan anggota-anggota Majelis Rakyat pada penduduk negara, Rakyat Kerajaan Belanda (*Nederlandsch Orderdaan*) laki-laki dan perempuan.
 - g. Menentukan wakil-wakil pemilih baik laki-laki maupun perempuan (*Kiesmanen en Kiesvrowen*) buat yang tidak pandai membaca dan menulis salah satu tulisan di Indonesia.
3. Volksraad dan Majelis Rakyat bersama-sama menjadi perwakilan rakyat.
 4. Pemerintah dan Perwakilan Rakyat bersama-sama menjadi “Pemerintah Berdiri Sendiri” (*Self Government*).
 5. Pemerintah berdiri sendiri mengatur kepentingan negara (*Begrooting*, dll).
 6. Pemerintah luhur (*Opperbestuur*) dan pemerintah berdiri sendiri (*Self Government*) bersama-sama menentukan:
 - a. Hukum Dasar Negara (*constitutie*) yang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak saja susunan tata negara, tetapi susunan sosial ekonomi dan masyarakat juga diatur menurut atas kerakyatan (*Demokrasi*).
 - b. Perhubungan dengan negara-negara lain.
 - c. Peraturan-peraturan kepentingan pertahanan (*pembelaan*) negara.
 7. Susunan tata negara yang menciptakan Indonesia Berparlemen hendaklah tercapai dalam 5 tahun, jika perlu menggunakan *staatsnoodrecht* (*Penjedar*, no. 9, 27 Februari 1941; EYD dari penulis).

Memorandum yang diajukan GAPI itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengurus sendiri bangsa dan negaranya. Hal ini juga sekaligus menghapus ketidakpercayaan pemerintah kolonial yang selalu menganggap bahwa bangsa Indonesia masih mentah dan belum bisa menyelenggarakan pemerintah sendiri.

Sebagaimana dijelaskan pada butir C.2.d bahwa pemerintah Hindia Belanda akan mengadakan Majelis Rakyat. Meskipun aksi GAPI ditolak, akan tetapi Majelis Rakyat Indonesia terbentuk sebagai pengganti Kongres Rakyat Indonesia (13-14 September 1941). Pembentukan MRI itu juga tidak lepas dari tujuan GAPI semula: mencapai kesentosaan dan kemuliaan rakyat yang berdasarkan demokrasi. Tambahan pula MRI ini dianggap sebagai suatu badan perwakilan rakyat Indonesia, dimana di dalamnya terdapat GAPI, MIAI, dan PVPN.

Jika dilihat anggota-anggotanya MRI ini dapat dikatakan sebagai konsentrasi nasional. Apalagi ia merupakan badan yang meliputi seluruh pergerakan rakyat. Akan tetapi unsur dari GAPI mempunyai pengaruh terbesar dalam MRI. Agar terlihat aktivitas dan orientasi konsentrasi nasional PPPKI dan GAPI. Di bawah ini akan dijelaskan perbandingan keduanya.

I. Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya (PBI dan PARINDRA)

Gerakan kebangsaan memiliki tujuan utama yaitu menghapuskan penderitaan rakyat melalui kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Pada pertengahan bulan November 1930, kelompok Studi Indonesia di Surabaya yang berperan dalam gerakan kebangsaan dengan menyetujui pikirannya melalui surat kabar Soeloeh Rakyat Indonesia. Kemudian namanya menjadi PBI, yang lebih menunjukkan partai lokal dengan pusatnya di Surabaya. Tokohnya adalah Soetomo yang berkewajiban memperbaiki kesejahteraan rakyat. Rukun Tani yang didirikan PBI memiliki pengaruh luas di kalangan petani dan berhasil meyakinkan perbaikan dan kesejahteraan petani terlebih pada masa depresi ekonomi.

Pada waktu itu gerakan nonkooperasi sedang dalam kematian maka tidak mengherankan kalau PBI mengkritik mereka dengan mengatakan bahwa sikap nonkooperasi memang perlu, tetapi tidak kuasa menghadapi pemerintah. Sebaliknya PBI dikritik sebagai organisasi yang tidak mempunyai karakter karena sikap politiknya kooperatif dan sifatnya insidental, artinya kalau menang tidak cocok dengan politik pemerintah organisasi ini tidak segan-segan mengundurkan diri dari perwakilan (Pringgogidgo, 1964: 112).

Dilumpuhkannya gerakan nonkooperasi pada tahun 1930-an mempercepat perkembangan kerjasama PBI dan BU. Pada tahun 1935 kedua partai itu membentuk Parindra dan ikut di dalamnya Serikat Selebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, perkumpulan kaum Betawi, dan Tirtayasa yang terus melanjutkan politik kooperasi moderatnya. Dengan terbentuknya Partai Parindra persatuan golongan kooperasi makin kuat. Tujuannya sama dengan PBI dan sifatnya yang insidental artinya apabila ada kejadian yang mengecewakan organisasi itu, maka diputuskan untuk sementara menarik wakil-wakil dari badan perwakilan.

Terdapat garis penghubung antara Studi Indonesia, PBI, dan Parindra yaitu ketiganya sangat aktif dan konstruktif terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh untuk menolong petani didirikan Perkumpulan Rukun Tani, untuk memajukan pelayaran didirikan Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin), dan juga didirikan Bank Nasional Indonesia.

J. Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO)

Bekas pimpinan Partindo mendirikan Gerindo di Jakarta tanggal 24 Mei 1937. Diantara pemimpinnya adalah A. K. Gani, Mr. Mohamad Yamin, dan Mr. Sartono. Gerindo memiliki azas koperasi, mau kerjasama dengan pemerintah, para anggotanya boleh duduk dalam badan perwakilan, organisasi ini bercorak internasional dan sosialis dan terus mempertahankan demokratis.

Pemimpin Gerindo tidak setuju dengan sebagian kaum nasionalis yang lebih setuju pada paham fasisme daripada demokrasi. Untuk itu Gerindo bergerak di bawah tanah memerangi fasisme, dengan dana 2.500 Yen Jepang pemberian pemerintah Belanda untuk menentang Jepang. Dalam beberapa kongres, Gerindo ingin mencapai bentuk masyarakat yang bersendikan demokrasi politik, ekonomi dan sosial, dengan jalan demokrasi.

Ketidak sesuaian pendapat menyebabkan Mr. Muhamada Yamin dipecat, dan ia mendirikan partai baru dengan nama Partai Persatuan Indonesia (Parpindo) pada tanggal 21 Juli 1939 di Jakarta. Sifatnya koperasi dengan mengusung asas sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

K. Petisi Sutardjo

Langkah-langkah baru dalam pergerakan nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan non-kooperatif jelas tidak mendapat jalan, sementara gerakan kooperatif mendapat persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Karena itu masih ada jalan untuk meneruskan perjuangan lewat Dewan Rakyat. Partai-partai politik masih ada kesempatan untuk melakukan aksi bersama sehingga muncullah dengan apa yang disebut Petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936.

Sutarjo mengajukan usul pada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik yang berupa otonomi meskipun masih ada dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerjasama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Jelas petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.

Petisi yang ditandatangani I. J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kwo Kwat Tjong dapat dipandang sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit yang dilalui para nasionalis, namun berbagai pihak memberikan kritik bahwa petisi tersebut sama halnya dengan meminta-minta untuk dikasihani, lain pihak memandang petisi tersebut dapat mengurangi perjuangan otonomi yang dilakukan pihak lain. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu dan *Vaderlandse Club* (VC) menganggap hal itu terlalu dini.

L. Gabungan Politik Indonesia dan "Indonesia Berparlemen"

Penolakan petisi Sutarjo sangat mengecewakan para pemimpin nasional. Sehingga hal ini melemahkan semangat mereka dan mulai muncul perbedaan pendapat. Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, M. H. Thamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melalui pembentukan organisasi baru yaitu mendirikan Gapi pada bulan Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan dan PSII. Pada tanggal 21 Mei 1939, organisasi-organisasi nasionalis yang penting, kecuali PNI Baru, membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang menghendaki dibentuknya parlemen penuh bagi Indonesia. Paguyuban Pasundan menyetujui dibentuknya konsentrasi nasional itu dengan mengirim tiga orang wakil, yaitu Atiek Soerdi, R. Soeradiredja, dan Ir. Oekar

Bratakoesoemah. Paguyuban mensyaratkan agar GAPI didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. ikhtiar harus bersemangat sucio
2. ikhtiar harus benar-benar atas dasar saling hormat menghormati
3. pendirian saling hormat menghormati itu harus diusahakan terus dari atas sampai ke bawah
4. ikhtiar itu harus dijauhkan dari maksud yang hanya sebagai demonstrasi saja.

Setelah tuntutan Indonesia berparlemen tidak mendapat tanggapan yang wajar dari pemerintah, tampak dengan jelas bahwa jurang pemisah antara para pemimpin Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda menjadi semakin lebar. Dengan demikian majelis rakyat Indonesia dipandang sebagai badan perwakilan rakyat Indonesia yang bertujuan mencapai kesentosaan dan kemuliaan rakyat berdasarkan demokrasi., Sejak saat itu aksi Indonesia berparlemen, yang mula-mula dilancarkan GAPI dilanjutkan oleh majelis rakyat Indonesia.

GAPI hendak mengadakan aksi, menuntut pemerintah dengan mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggungjawab. Jika tuntutan GAPI diluluskan, GAPI akan mengajak rakyat Indonesia untuk menghimpangi kemurahan hati pemerintah. Itulah jawaban pergerakan nasional terhadap penolakan petisi Sutarjo.

Pada tanggal 24 Desember 1939 GAPI membentuk sebuah badan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan untuk membahagiakan dan mensentosakan penduduk. Kegiatan Gapi selanjutnya dilakukan oleh KRI yang kemudian mengadakan kongres-kongres “Indonesia Berparlemen” tetap merupakan tujuan utama GAPI, selain memajukan masalah-masalah sosial ekonomi. GAPI juga menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, lagu “Indonesia Raya” menjadi lagu kebangsaan dan bendera merah putih menjadi bendera Indonesia.

Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI, Untuk menjawab ini semua pemerintah hanya membentuk Komisi Visman. Meski demikian GAPI terus menempuh demi tercapainya “Indonesia Berparlemen”. Untuk mengefektifkan perjuangan GAPI, KRI diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam sebuah konferensi di Yogyakarta tanggal 14 September 1941. Sebagai satu federasi, maka yang

duduk dalam dewan pimpinan adalah GAPI, MIAI dan PVPN, berturut-turut mewakili federasi organisasi politik, organisasi Islam, dan frderasi serikat pekerja dan pegawai negeri.

Setiap organisasi yang menjadi wadah federasi partai politik mempunyai organ-organ pelaksana dan hal ini dapat dibanding-bandingkan PPKI dengan Kongres Indonesia Raya, GAPI dengan KRI, dan Dewan Pimpinan dengan MRI. Kongres memilih Mr. Sartono sebagai ketua MR

Satu-satunya tuntutan kaum nasionalis yang di penuhi pemerintah adalah pembentukan komisi visman dalam bulan Maret 1941. Panitia bertugas menyelidiki sejauhmana kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan perubahan pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan komisi ini sangat mengecewakan karena dari hasil yang dicapai komisi itu adalah hanya keinginan orang-orang Indonesia dimana masih tetap dalam ikatan dengan kerajaan Belanda.

Penolakan petisi Sutarjo sangat mengecewakan para pemimpin nasional. Sehingga hal ini melemahkan semangat mereka dan mulai muncul perbedaan pendapat. Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, M. H. Thamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melalui pembentukan organisasi baru yaitu mendirikan Gapi pada bulan Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan dan PSII.

GAPI hendak mengadakan aksi, menuntut pemerintah dengan mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggungjawab. Jika tuntutan GAPI diluluskan, Gapi akan mengajak rakyat indonesia untuk menghimpangi kemurahan hatu pemerintah. Itulah jawaban pergerakan nasional terhadap penolakan petisi Sutarjo.

Pada tanggal 24 Desember 1939 Gapi membentuk sebuah badan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan untuk membahagiakan dan mensentosakan penduduk. Kegiatan Gapi selanjutnya dilakukan oleh KRI yang kemudian mengadakan kongres-kongres “Indonesia Berparlemen” tetap merupakan tujuan utama Gapi, selain memajukan masalah-masalah sosial ekonomi. Gapi juga menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, lagu “Indonesia Raya” menjadi lagu kebangsaan dan bendera merah putih menjadi bendera Indonesia.

Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi Gapi, Untuk menjawab ini semua pemerintah hanya membentuk Komisi Visman. Meski demikian Gapi terus menempuh demi tercapainya “Indonesia Berparlemen”. Untuk mengefektifkan perjuangan Gapi, KRI diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam sebuah konferensi di Yogyakarta tanggal 14 September 1941. Sebagai satu federasi, maka yang duduk dalam dewan pimpinan adalah Gapi, MIAI dan PVPN, berturut-turut mewakili federasi organisasi politik, organisasi Islam, dan frderasi serikat pekerja dan pegawai negeri.

Setiap organisasi yang menjadi wadah federasi partai politik mempunyai organ-organ pelaksana dan hal ini dapat dibanding-bandingkan PPKI dengan Kongres Indonesia Raya, Gapi dengan KRI, dan Dewan Pimpinan dengan MRI. Kongres memilih Mr. Sartono sebagai ketua MR

Satu-satunya tuntutan kaum nasionalis yang di penuhi pemerintah adalah pembentukan komisi visman dalam bulan Maret 1941. Panitia bertugas menyelidiki sejauhmana kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan perubahan pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan komisi ini sangat mengecewakan karena dari hasil yang dicapai komisi itu adalah hanya keinginan orang-orang Indonesia dimana masih tetap dalam ikatan dengan kerajaan Belanda.

M. Partai Indonesia Raya (Partindo)

Partindo merupakan pecahan dari PNI pimpinan Soekarno dan setelah Soekarno selesai menyelesaikan hukumannya ia langsung diajak bergabung dalam partai baru ini oleh Mr. Sartono karena dengan adanya Soekarno di Partindo akan menarik lebih banyak massa pendukung melalui propaganda dan orasi Soekarno.

Tujuan dari Partindo sendiri ialah mencapai satu negara Republik Indonesia merdeka dan kemerdekaan akan tercapai jika ada persatuan seluruh bangsa Indonesia, konsep sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme dari Soekarno diterima sebagai cita-cita yang dituju Partindo, realisasi perjuangan Partindo tetap dengan cara nonkoperasi .

Partindo pun semakin rutin mengadakan kongres dan pada setiap kongresnya selalu dijelaskan konsep Marhaenisme, keadilan sosial, kerakyatan dan kebangsaan, serta persatuan Indonesia. Akibat dari propaganda yang dilancarkan Soekarno pemerintah kolonial bersikap keras dan mengeluarkan peraturan larangan bagi para pegawai negeri

untuk tidak jadi anggota Partindo, sehingga pada puncaknya gubernur jenderal De Jounge menangkap Soekarno dan dibuang ke Ende Flores, dan Partindo pun menjadi sempit ruang geraknya meski begitu Partindo berjalan sampai bubar tahun 1936.

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. E. Koorver, (1985) *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil*. Jakarta: Grafiti Press
- Adam, Asvi Marwan .(2007). *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Dimjati, M. (1951). *Sedjarah Perdjuangan Indonesia*. Djakarta: Widjaja.
- Duijs, J.E.W. (1985). *Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda*.
Terj. K.L.M. Tobing. Jakarta: Gunung Agung.
- Frederick, W.H. dan Soeri Soeroto. (1991). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Hatta, M. (1981). *Memoirs*. Penders, C.L.M. (ed.). Singapore: Gunung Agung.
- Koch, D.M.G. (1951). *Menudju Kemerdekaan*. Terdj. Abdoel Moeis. Djakarta: Pembangunan.
- Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900 – 1942*. Jakarta: LP3ES.
- Poesponegoro, M.D. & Notosusanto, N. (1981). *Sejarah Nasional Indonesia* . Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A.K. (1980). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- P.K. Ojong. (2006). *Perang Pasifik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Reni Nuryanti, (2007). *Perempuan dalam Hidup Soekarno; Biografi Inggit Garnasih*. Yogyakarta: Ombak.
- Sjahrir, Sutan. (1947). *Fikiran dan Perdjuangan*. Djakarta: Dian Rakjat.
- Suhartono, (2001). *Sejarah Pergerakan Nasional* (dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryanegara, A.M. (1996). *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sjamsuddin, Helius. (1994). “Pola Tarik Ulur Daya Sentripetal dan Daya Sentrifugal Dalam Sejarah Indonesia”. *Makalah*. Bandung: IKIP Bandung.
- Slamet Muljana. (1968). *Nasionalisme Sebagai Modal Perdjuangan Bangsa Indonesia*. Djakarta: Balai Pustaka.

Surat Kabar /Majalah:

Penjedar, no.9, 27 Februari 1941.

Sinar Pasoendan, 26 Mei 1939.

Tjahya Timoer, 22 Mei 1939